



LAPORAN TAHUNAN

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN**

2024



Daftar

Isi

BAB

01

Kinerja Prasarana dan Sarana Pertanian

hal. 01

BAB

02

Direktorat Irigasi Pertanian

hal. 14

BAB

03

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

hal. 33

BAB

04

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

hal. 60

BAB

05

Direktorat Pupuk dan Pestisida

hal. 78

BAB

06

Direktorat Pembiayaan Pertanian

hal. 91

BAB

07

Lampiran

hal. 103



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024 yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Program dan Kegiatan yang diemban oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang telah dilakukan selama periode tahun anggaran 2024 pada masing-masing unit Eselon II. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditentukan upaya tindak lanjut untuk pencapaian sasaran target pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran kinerja Ditjen PSP dan dapat memberikan manfaat dan menjadi umpan balik bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Jenderal,



Andi Nur Alam Syah, S.TP., M.T.



BAB I

K I N E R J A P R A S A R A N A D A N S A R A N A P E R T A N I A N



VISI
MISI

SASARAN
PROGRAM

DITJEN PSP
TAHUN KE TAHUN

Peran Prasarana dan Sarana Pertanian dalam Pembangunan Nasional



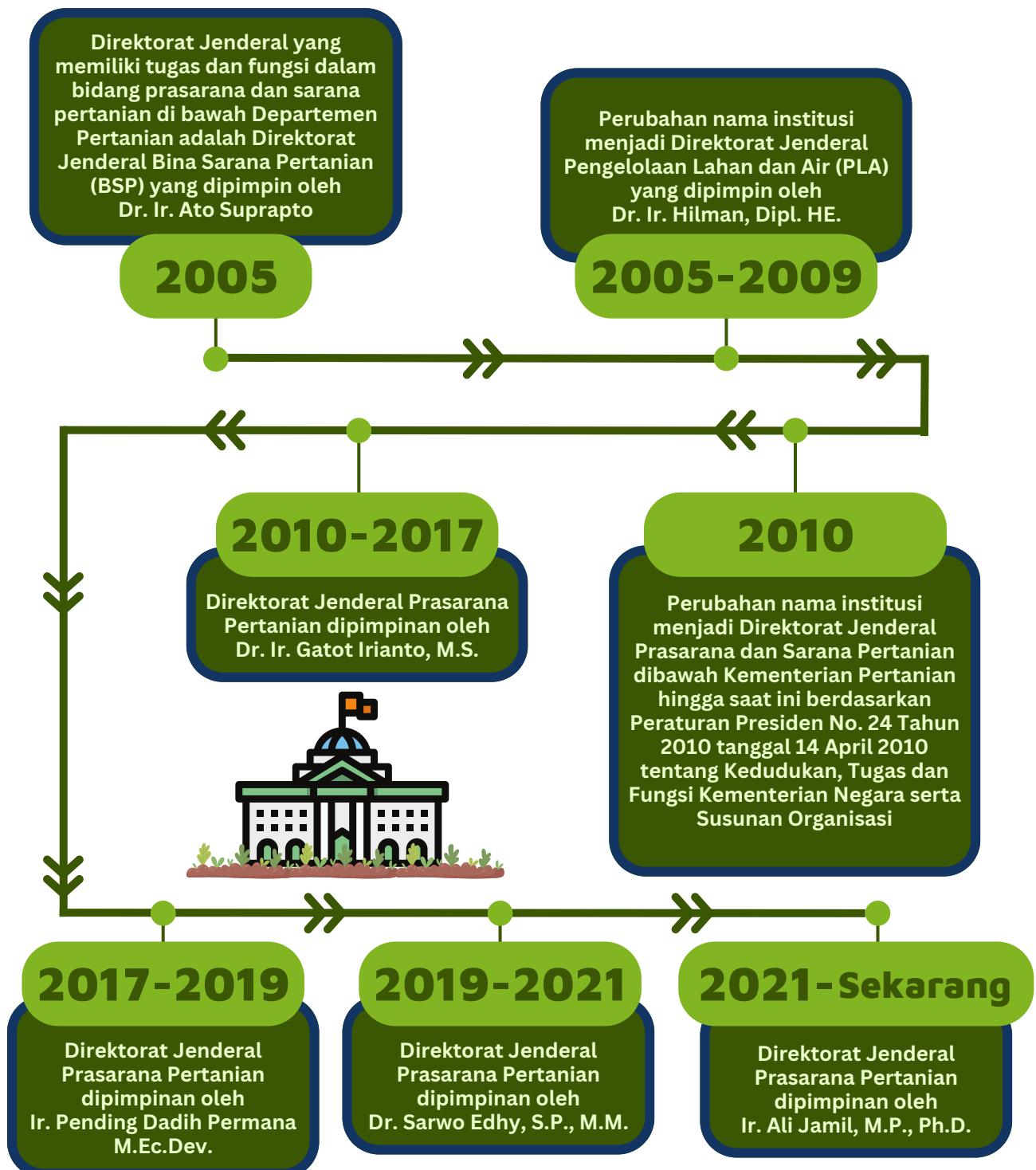
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP), Andi Nur Alam Syah usai dilantik (9/8), langsung terjun melakukan giat percepatan pemasangan pompa di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurut Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen.



Ditjen PSP dari Tahun ke Tahun

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai unit eselon I Kementerian Pertanian berperan untuk memfasilitasi seluruh program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian di subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terus berinovasi dari masa ke masa, menyesuaikan dinamika dan perkembangan teknologi, sehingga kualitas penyaluran bantuan pemerintah untuk pertanian Indonesia tetap terjaga optimal.



Ruang Lingkup

Prasarana dan Sarana Pertanian

Secara normatif, tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida serta alat mesin pertanian. Sedangkan fungsinya adalah:

- 01 Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 02 Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen
- 03 Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen
- 04 Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen
- 05 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen
- 06 Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- 07 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri



Visi

Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung pertanian berkelanjutan

Misi

- 01 Mendorong partisipasi *stakeholder* dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- 02 Mendayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan
- 03 Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas
- 04 Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan.
- 05 Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana
- 06 Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai asas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga).
- 07 Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- 08 Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
- 09 Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida
- 10 Menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian
- 11 Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.



Sasaran Program



Berdasarkan Peta Strategi Kementerian Pertanian yang disusun menggunakan *Balanced Scorecard* di atas, kontribusi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas”. *Output* Kementerian Pertanian berupa peningkatan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas serta peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tidak dapat tercapai tanpa adanya peningkatan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian. Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Baseline 2020	Target				
				2021	2022	2023	2024	
1	Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan							
1.	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	50,43	56,16	56,77	57,41	58,07	
2.	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50,00	65,00	80,00	90,00	100,00	
2	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan							
3.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	81,62	81,33	82,18	82,18	82,18	
3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
4.	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	34,81	34,83	34,88	34,93	34,98	
4	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas							
5.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	81,00	83,00	84,00	85,00	86,00	

Sumber: Rencana Strategis Ditjen PSP 2020-2024 (November 2022)

Setiap upaya dan aktivitas yang dilakukan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian wajib memiliki keterkaitan dalam mencapai visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam perumusannya, Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2020 – 2024 memperhatikan arah kebijakan Kementerian Pertanian, arahan Pimpinan (Pejabat setingkat Eselon I dan Eselon II).



Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai unit Eselon I Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi ke-2 Kementerian Pertanian, yaitu "Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian". Berdasarkan arah strategis nasional (RPJMN 2020 - 2024) dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.

Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020 - 2024



SUMBER : BUKU RENCANA STRATEGIS DITJEN PSP 2020 - 2024



Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian akan berkontribusi terhadap indeks pertanaman (IP) dan luas panen pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian. Pemanfaatan dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian, membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana pertanian, meliputi: ketersediaan pengairan pertanian, pengendalian pupuk dan pestisida, optimasi alat dan mesin pertanian, ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Pilar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020 - 2024



Arah Kebijakan 1

Penyediaan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Strategi 1 : Memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan



Arah Kebijakan 4

Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

Strategi 4 : Mendorong Pemanfaatan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian



Arah Kebijakan 2

Penyediaan Jaringan Irigasi Pertanian secara Efektif dan Efisien

Strategi 2 : Modernisasi dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian untuk memastikan seluruh Lahan Pertanian Beririgasi



Arah Kebijakan 5

Pemanfaatan Alsintan untuk Pembangunan Pertanian Berbasis Kewilayahan

Strategi 5 : Meningkatkan Pemanfaatan Alsintan Berkualitas secara Merata



Arah Kebijakan 3

Penyediaan Pupuk dan Pestisida untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Strategi 3 : Distribusi Pupuk dan Pestisida terstandart berdasarkan prioritas



Arah Kebijakan 6

Pelaksanaan RB Ditjen PSP sesuai Road Map RB Kementerian Pertanian

Strategi 6 : Melaksanakan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi sesuai wewenang Ditjen PSP

Sumber : Buku Rencana Strategis Ditjen PSP 2020 - 2024



Dukungan Anggaran TA 2024 Ditjen PSP

Program Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang membawahnya dan memiliki anggaran sesuai dengan kebutuhan program maupun kegiatan yang dilaksanakannya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan Direktorat Jenderal dengan pagu anggaran terbesar di lingkup Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2024

No	Nama Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi SP2D		Outstanding Kontrak (Rp)	Realisasi + Outstanding		Jml Diblokir /Revisi (Rp)	Dana Tersedia (Rp)
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		
1	Badan Karantina Pertanian	33.346.902.000	33.323.966.821	99,93	-	33.323.966.821	99,93	-	22.935.179
2	BPSDMP	1.188.973.395.000	1.167.766.427.182	98,22	30.000.000	1.167.796.427.182	98,22	11.210.768.000	9.966.199.818
3	Ditjen Peternakan & Keswan	1.009.589.095.000	963.582.252.273	95,44	23.919.700	963.606.171.973	95,45	31.092.815.000	14.890.108.027
4	Ditjen Tanaman Pangan	3.278.835.155.000	3.100.333.678.884	94,56	11.061.520.500	3.111.395.199.384	94,89	53.860.286.000	113.579.669.616
5	Sekretariat Jenderal	1.238.632.167.000	1.131.256.127.399	91,26	400	1.131.256.127.799	91,26	73.683.684.000	34.692.355.201
6	BSIP	933.853.861.000	850.578.324.698	91,08	42.027.725	850.620.352.423	91,09	67.975.216.000	15.258.292.577
7	Ditjen PSP	6.659.570.879.000	5.983.788.612.450	89,85	11.200.987.670	6.005.067.201.179	90,17	97.781.919.000	556.721.758.821
8	Ditjen Hortikultura	433.499.771.000	382.274.923.427	88,18	100	382.274.923.527	88,18	47.944.825.000	3.280.022.473
9	Ditjen Perkebunan	716.865.567.000	622.860.652.234	86,91	27.720.000	622.888.372.234	86,91	65.858.733.000	27.918.461.766
10	Inspektorat Jenderal	125.024.676.000	76.014.788.869	60,80	-	76.014.788.869	60,80	48.121.868.000	888.019.131
Total		15.618.991.468.000	14.311.779.754.237	91,63	22.386.176.095	14.344.243.531.391	91,84	497.530.114.000	777.217.822.609

Sumber Data:

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kementerian Negara/Lembaga
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 (OMSPAN, Kementerian Keuangan)

Dukungan alokasi melalui dana APBN pada Tahun Anggaran 2024 kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar **Rp. 6.659.570.879.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.983.788.612.450 (89,85%)**. Pada tahun anggaran ini, DIPA Ditjen PSP telah mengalami 13 (tiga belas) revisi DIPA menyesuaikan dengan tujuan organisasi Kementerian Pertanian.

Dukungan alokasi melalui dana APBN pada Tahun Anggaran 2024 kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 6.659.570.879.000. Dari pagu tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kewenangannya, yakni Dana Pusat sebesar Rp. 2.561.234.456.000, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 3.125.000.000, dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 4.095.211.423.000. Dana Pusat adalah dana yang digunakan oleh Satuan Kerja Pusat yang berisi program yang dilaksanakan langsung oleh pusat (baik kegiatan bantuan pemerintah maupun prioritas nasional) dan dukungan manajemen pusat. Dana Dekonsentrasi adalah dana APBN Kementerian Pertanian yang dilimpahkan wewenangnya kepada gubernur untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dan kegiatannya bersifat non-fisik. Selain itu, Dana Tugas Pembantuan adalah dana APBN Kementerian Pertanian yang dilimpahkan wewenangnya kepada daerah dan/atau desa untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur/Bupati/Walikota selaku wakil Pemerintah Pusat dan kegiatannya bersifat fisik.



Dukungan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 melalui dana APBN dioptimalkan oleh kinerja masing-masing direktorat yang berada di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Ditjen PSP TA 2024

No.	Kode	Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu(Rp)	Realisasi	
				(Rp)	(%)
1	1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	2.101.293.000.000	1.849.160.381.475	88,00
2	1794.AEA	Koordinasi	25.968.600.000	25.846.585.102	99,53
3	1794.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (UPLAND)	150.000.000.000	91.947.982.523	61,30
4	1794.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.797.899.400.000	1.604.032.470.849	89,22
5	1794.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	127.425.000.000	127.333.343.001	99,93
6	1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	2.313.613.298.000	2.107.868.379.681	91,11
7	1795.AEA	Koordinasi	20.443.310.000	19.722.085.465	96,47
8	1795.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000.000	-	-
9	1795.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	2.172.299.603.000	1.993.279.010.828	91,76
10	1795.RBR	Dukungan Teknis	118.870.385.000	94.867.283.388	79,81
11	1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1.845.766.441.000	1.766.351.474.349	95,70
12	1796.AEA	Koordinasi	48.542.901.000	43.475.475.345	89,56
13	1796.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.797.223.540.000	1.722.875.999.004	95,86
14	1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP	168.193.570.000	92.484.429.644	54,99
15	1797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	95.076.826.000	51.179.334.670	53,83
16	1797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.729.179.000	752.011.895	11,18
17	1797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	65.578.750.000	40.037.663.788	61,05
18	1797.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	808.815.000	515.419.291	63,73
19	3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	186.991.170.000	124.235.828.683	66,44
20	3993.AEA	Koordinasi	2.799.876.000	2.538.404.205	90,66
21	3993.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	7.608.080.000	6.835.925.314	89,85
22	3993.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	176.583.214.000	114.861.499.164	65,05
23	3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	43.713.400.000	43.688.109.618	99,94
24	3994.AEA	Koordinasi	563.000.000	560.831.553	99,61
25	3994.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.150.400.000	43.127.278.065	99,95
Total			6.659.570.879.000	5.983.788.603.450	89,85

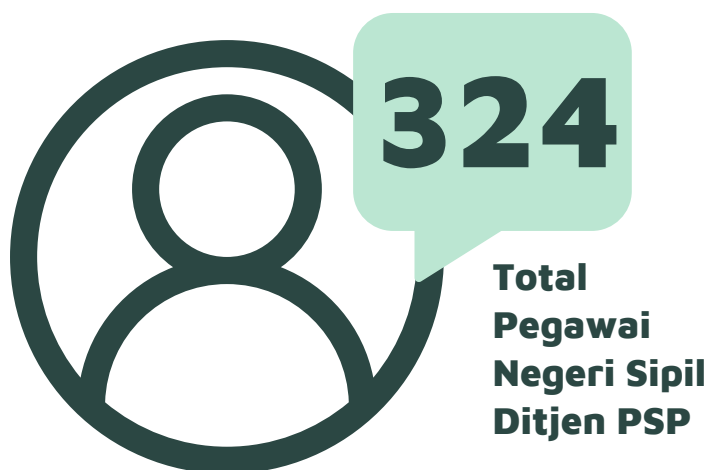


Struktur Organisasi

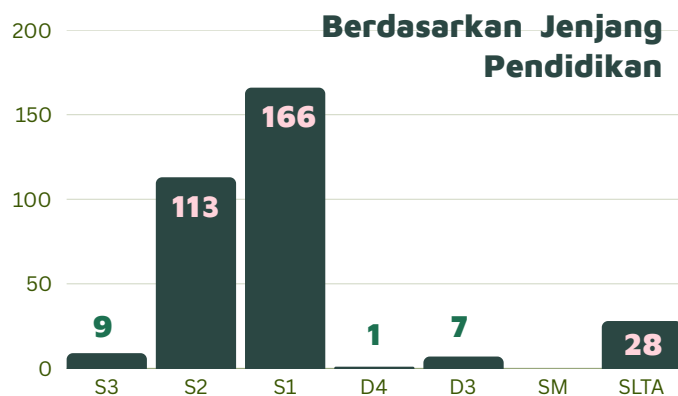
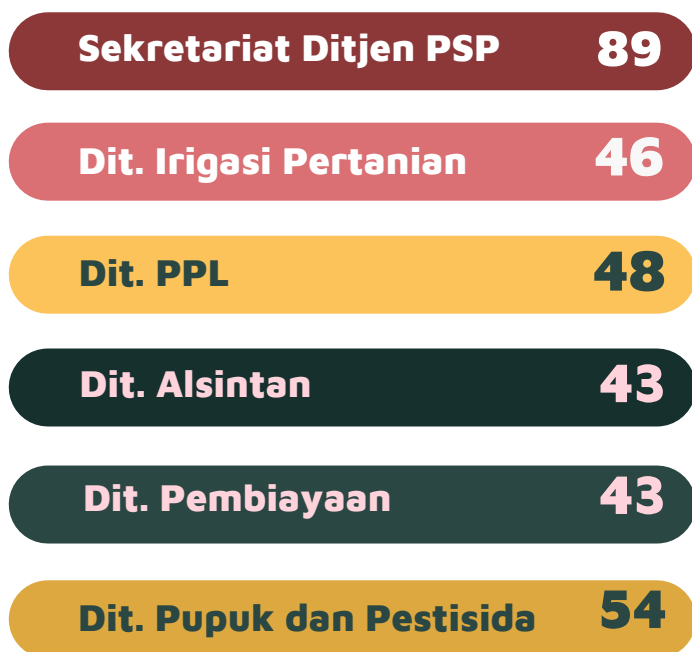


Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen PSP

Komposisi jumlah pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.



Jumlah Pegawai per Direktorat



BAB II

DIREKTORAT
IRIGASI PERTANIAN

PAGU
ANGGARAN

REALISASI
ANGGARAN

Struktur Organisasi

Direktorat Irigasi Pertanian



DIREKTUR IRIGASI PERTANIAN

Faisyal, ST, MM
Kepala Subbagian Tata Usaha
Direktorat Irigasi Pertanian

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

Handi Arief, ST, M.AP
Ketua Kelompok Substansi
Pengembangan Jaringan Irigasi dan P3A

Emir Kartarajasa, ST, MT
Ketua Kelompok Substansi
Pengelolaan Sumber Air Pertanian

Risda Sinaga, Sp. M.Si
Ketua Kelompok Substansi
Iklim dan Konservasi Air

Eko Wahyudi, ST
Ketua Tim Kerja
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Ir. Tri Hartono
Ketua Tim Kerja
Air tanah

Nurul Chair, SP, MM
Ketua Tim Kerja
Mitigasi Iklim

Widyastuti Djumakking, ST
Ketua Tim Kerja
Perkumpulan Petani Pemakai Air

Sukmawati Setyaningtyas, ST, M.Sc
Ketua Tim Kerja
Air Permukaan

Wahyuni Setyo Lestari, S.T, M.Sc, MP
Ketua Tim Kerja
Konservasi Air



Kinerja Anggaran

Upaya menjamin ketersediaan air irigasi untuk pertanian dalam jangka panjang dan berkelanjutan harus dilakukan melalui strategi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi pertanian (infrastruktur irigasi) ditingkat usaha tani secara terintegrasi dengan sumber air dari jaringan primer dan sekunder.

Program pengembangan irigasi pertanian melalui kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi berupa kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dan Pemberdayaan P3A, Pengembangan Sumber Air berupa kegiatan irigasi perpipaan/perpompaan air tanah dangkal/dalam, dan Pengembangan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim berupa kegiatan embung/dam parit/longstorage merupakan kegiatan yang berupaya menyempurnakan pengelolaan air irigasi yang adaptif lingkungan fisik dan non fisik.

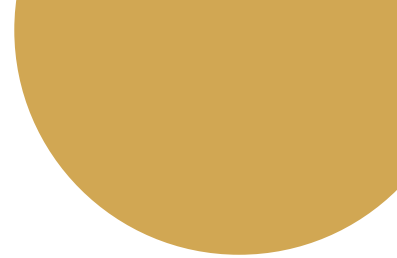
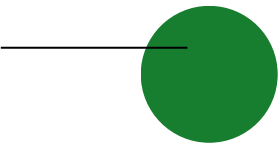
Kegiatan aspek Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian TA. 2024 mendapatkan anggaran sebesar 2.101.293.000.000 dengan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. **1.832.521.597.016**, yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur Irigasi Pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan dana pusat serta dukungan manajemen aspek Irigasi Pertanian.

Realisasi Keuangan Kegiatan Irigasi Pertanian Tahun 2024



KEGIATAN/KRO/RO/OUTPUT/SUB OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) (%)	
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	356.992.413.000	350.508.994.625	98,18
1794.AEA	Koordinasi	18.447.870.000	18.113.430.688	98,19
1794.AEA.001	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup irigasi Pertanian	18.447.870.000	18.113.430.688	98,19
1794.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	150.000.000.000	144.334.454.973	96,22
1794.BDD.001	Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi	150.000.000.000	144.334.454.973	96,22
1794.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	110.374.623.000	109.892.188.964	99,56
1794.RBK.001	Irigasi Perpipaan	128.400.000	113.929.000	88,73
1794.RBK.002	Embung Pertanian	50.860.000.000	50.571.805.039	99,43
1794.RBK.003	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Pompa Hidram)	58.300.623.000	58.142.517.625	99,73
1794.RBK.U87	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur	201.000.000	201.000.000	100,00
1794.RBK.U88	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur	135.000.000	135.000.000	100,00
1794.RBK.U90	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah	108.850.000	95.395.000	87,64
1794.RBK.U91	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah	542.800.000	539.730.800	99,43
1794.RBK.U93	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	15.000.000	15.000.000	100,00
1794.RBK.U94	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat	82.950.000	77.811.500	93,81
1794.RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	77.100.000.000	77.100.000.000	100,00
1794.RDK.001	Jaringan Irigasi Tersier	77.100.000.000	77.100.000.000	100,00
1794.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.069.920.000	1.068.920.000	99,91
1794.PBR.001	Survei Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian	1.069.920.000	1.068.920.000	99,91





Sejalan dengan Rancangan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020-2024, program kerja Direktorat Irigasi Pertanian yaitu :

- Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik yang bersumber dari air tanah maupun air permukaan;
- Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui kegiatan pengembangan jaringan air irigasi;
- Terwujudnya upaya konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan efektif dan aliran permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan;
- Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) untuk mendorong pola pengelolaan irigasi partisipatif, serta terupdatednya data P3A sebagai bagian dari proses pembinaan usaha ekonomi dan pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani;
- Pengembangan basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air melalui inventarisasi, validasi, dan konsolidasi data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan air serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi.

Adapun kinerja serapan anggaran aspek Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian TA. 2024 dari target senilai sebesar Rp. 2.101.293.000.000,00 sampai dengan 31 Desember tahun 2024 telah teralisasi sebesar Rp. 1.830.696.705.391,00 (87,65%), yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan Infrastruktur Irigasi Pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan dana pusat serta dukungan manajemen aspek Irigasi Pertanian.

Keberhasilan capaian kinerja aspek pengelolaan irigasi pertanian, karena adanya komitmen yang kuat antara petugas pengelola irigasi pertanian baik di pusat maupun daerah. Hambatan dan kendala yang dihadapi sampai pada akhir kegiatan diantaranya adalah :

- Adanya revisi DIPA V yang terbit pada tanggal 3 April 2024 dimana muncul alokasi irigasi perpompaan melalui dana Tugas Pembantuan dan adanya penambahan ABT untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan melalui dana Tugas Pembantuan yang terbit pada tanggal 25 Juni 2024 (alokasi total irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan mencapai 15.339 unit), sehingga memerlukan tenaga ekstra untuk proses CPCL sampai dengan pencairan anggaran dan pelaksanaan fisik.
- Untuk beberapa kegiatan di UPLAND yang melalui mekanisme kontraktual proses pelelangan membutuhkan waktu sehingga kurangnya antisipasi pelaksana menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda.
- Kendala administratif seperti: rekening kelompok yang sudah tidak aktif, penulisan nama di rekening bank yang berbeda dan berbeda ejaan dengan nama kelompok tani yang terdaftar dll sehingga proses pencairan ke rekening kelompok mengalami keterlambatan, pergantian petugas menyebabkan perubahan penyelesaian administrasi keuangan, perubahan nomenklatur dinas, penyampaian laporan kegiatan secara detail melalui aplikasi MPO;
- Masih terbatasnya basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air sebagai dasar penentuan lokasi pengembangan irigasi pertanian sehingga sulitnya menetapkan lokasi prioritas untuk kegiatan termasuk sulitnya menetapkan lokasi yang sesuai dengan kriteria teknis.
- Keterbatasan petugas pelaksana kegiatan, secara kuantitas maupun kualitas pada tingkat kabupaten dan provinsi.



Irigasi Perpompaan

Kegiatan Irigasi Perpompaan merupakan salah satu upaya optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian, dengan cara mendistribusikan air irigasi dengan menggunakan sarana pompa air sebagai penggeraknya dan saluran terbuka atau saluran tertutup sebagai sarana distribusinya, serta mendukung sub sektor tanaman pangan.

Kegiatan Irigasi Perpompaan dilakukan secara swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan melalui dana kewenangan Tugas Pembantuan (TP).

Lokasi kegiatan tersebar di **33 provinsi** dengan alokasi kegiatan Irigasi Perpompaan TA. 2024 sebanyak **9.904 unit** dengan total anggaran sebesar **Rp. 1.193.980.000.000** yang terdiri dari tahap konstruksi Rp. 1.117.171.200.000, tahap persiapan sebesar Rp. 56.420.800.000, dan kegiatan monitoring sebesar Rp. 20.388.000.000. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 1.128.242.036.377 (94,49%)** dan realisasi fisik mencapai **9.498 unit (95,90%)**.

Realisasi Kegiatan Irigasi Perpompaan TA 2024



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Kendala dan Tindak Lanjut



Kendala

- 1 Perubahan CPCL karena hasil verifikasi lapangan tidak memenuhi kriteria teknis
- 2 Beberapa dinas kabupaten tidak sanggup melaksanakan kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan karena tidak ada lokasi yang sesuai dengan kriteria teknis
- 3 Revisi POK kegiatan ABT tidak bisa langsung ke DJPb, diperlukan surat persetujuan revisi dari Ditjen PSP
- 4 Terbatasnya SDM di satker daerah mengingat banyaknya kegiatan yang perlu percepatan pada periode waktu yang bersamaan



Tindaklanjuti

- 1 Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten untuk percepatan verifikasi CPCL
- 2 Melakukan koordinasi dengan provinsi agar segera melakukan revisi POK untuk realokasi antar kabupaten apabila ada yang tidak sanggup melaksanakan kegiatan
- 3 Penanggung Jawab wilayah melakukan konsolidasi dan percepatan proses pemberkasan dan pencairan anggaran ke propinsi
- 4 Percepatan pekerjaan konstruksi agar pencairan tahap II segera bisa diproses
- 5 Melakukan koordinasi dengan provinsi yang akan melakukan revisi POK agar segera mengirimkan surat revisi untuk bisa segera diproses persetujuan revisi dari Ditjen PSP





Pompa Sentrifugal



Saluran Distribusi



Rumah Pompa Submersible



Rumah Pompa



Pompa Submersible



Bak Penampung



Rumah Pompa dan Bak Penampung

Dokumentasi Kegiatan

Trigasi Perpompaan



Irigasi Perpipaan

Kegiatan Irigasi Perpipaan merupakan salah satu upaya optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian, dengan cara mendistribusikan air irigasi dengan menggunakan saluran tertutup (sistem pipanisasi) sebagai suplesi irigasi baik yang berasal dari gravitasi maupun untuk mendukung irigasi yang menggunakan pompa air, serta mendukung sub sektor tanaman pangan.

Kegiatan Irigasi Perpipaan dilakukan secara swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan melalui dana kewenangan Tugas Pembantuan (TP).

Lokasi kegiatan tersebar di **28 provinsi** dengan alokasi kegiatan Irigasi Perpipaan TA. 2024 sebanyak **5.435 unit** dengan total anggaran sebesar **Rp. 543.500.000.000** yang terdiri dari tahap konstruksi Rp. 510.890.000.000, tahap persiapan sebesar Rp. 27.171.000.000, dan kegiatan monitoring sebesar Rp. 5.439.000.000. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 415.286.434.855 (76,45%)** dan realisasi fisik mencapai **4.204 unit (77,35%)**.

Realisasi Kegiatan Irigasi Perpipaan TA 2024



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Kendala dan Tindak Lanjut



Kendala

- 1 Perubahan CPCL karena hasil verifikasi lapangan tidak memenuhi kriteria teknis
- 2 Beberapa dinas kabupaten tidak sanggup melaksanakan kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan karena tidak ada lokasi yang sesuai dengan kriteria teknis
- 3 Revisi POK kegiatan ABT tidak bisa langsung ke DJPb, diperlukan surat persetujuan revisi dari Ditjen PSP
- 4 Terbatasnya SDM di satker daerah mengingat banyaknya kegiatan yang perlu percepatan pada periode waktu yang bersamaan



Tindaklanjuti

- 1 Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten untuk percepatan verifikasi CPCL
- 2 Melakukan koordinasi dengan provinsi agar segera melakukan revisi POK untuk realokasi antar kabupaten apabila ada yang tidak sanggup melaksanakan kegiatan
- 3 Penanggung Jawab wilayah melakukan konsolidasi dan percepatan proses pemberkasan dan pencairan anggaran ke propinsi
- 4 Percepatan pekerjaan konstruksi agar pencairan tahap II segera bisa diproses
- 5 Melakukan koordinasi dengan provinsi yang akan melakukan revisi POK agar segera mengirimkan surat revisi untuk bisa segera diproses persetujuan revisi dari Ditjen PSP





Pipa Distribusi



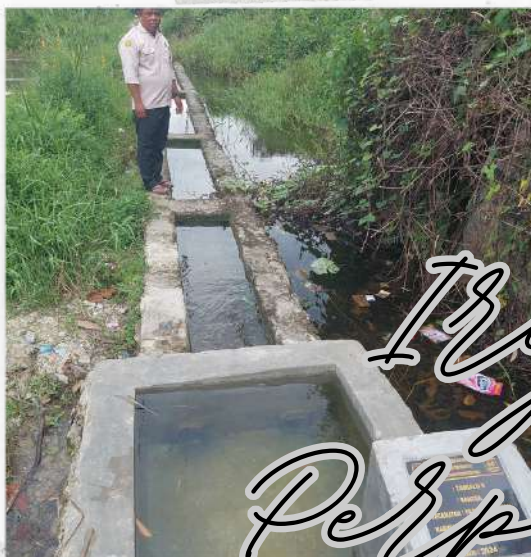
Pipa Distribusi



Bak Penampung



Bak Bagi



Bak Bagi



Pipa Distribusi

**Dokumentasi
Kegiatan**

*Irigasi
Perpipaan*



Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk penyediaan air tanaman serta memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang berasal dari air permukaan atau air tanah dan difasilitasi secara teknis sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani. Sumber-sumber air biasanya berada agak jauh dari lokasi budidaya pertanian seperti mata air, sungai dan sumber lainnya, diperlukan sebuah sistim yang dapat menjembatannya seperti Irigasi Bertekanan, Irigasi Air Tanah, Dam Parit, Normalisasi Saluran, dan Long Storage.

Pelaksanaan kegiatan Bangunan Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim dilakukan melalui Bantuan Pemerintah (Banpem) kepada masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangan, kearifan lokal dan spesifik lokasi penerima manfaat kegiatan.

Tahap persiapan dilakukan mulai dari Survei, Investigasi dan Desain sederhana (SID), Pemilihan Lokasi dan Kelompok Tani/P3A (CPCL) serta Pembuatan RUKK/RAB berdasarkan hasil desain sederhana. Tahap Pelaksanaan merupakan pelaksanaan konstruksi kegiatan oleh kelompok tani yang diantaranya meliputi pembelian material yang disesuaikan dengan kondisi lokasi dan kebutuhan di lapangan.

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun 2024 sebanyak **420 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 50.400.000.000**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **17 Provinsi dan 84 Kabupaten** dengan **realisasi fisik sebanyak 357 unit (80,98%)** dan **realisasi anggaran sampai akhir Desember 2024 sebesar Rp. 46.426.109.000 (84,25%)**.

Realisasi Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun 2024



Irigasi Bertekanan
233 unit



Normalisasi Saluran
33 unit



Dam Parit
100 unit



Long Storage
1 unit

Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Kendala dan Tindak Lanjut



Kendala

1

Alokasi anggaran menyesuaikan kebutuhan di lapangan sehingga target volume kegiatan tidak tercapai

2

Terdapatnya mekanisme dua kali pencairan, sehingga proses pelaksanaan konstruksi di lapangan agak terhambat karena menunggu pengajuan pencairan tahap II

3

Terdapatnya permasalahan terkait dokumen administrasi pencairan dana sehingga proses pencairan dana terhambat

4

Di beberapa lokasi progres pelaksanaan fisik di lapangan terkendala dikarenakan sudah memasuki musim penghujan, sehingga proses konstruksi mengalami keterlambatan

5

Masih terjadi keterlambatan dalam pelaporan MPO yang disebabkan oleh dokumen belum dilaporkan pada aplikasi MPO sesuai progress pelaksanaan kegiatan



Tindaklanjut

1

Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui pendampingan petugas lapangan dan tim teknis, serta secara cermat melakukan plotting luas layanan manfaat kegiatan

2

Melakukan percepatan pelaksanaan konstruksi di lapangan sehingga pencairan tahap II bisa segera diproses

3

Melakukan koordinasi dan pendampingan intensif pada kabupaten terkait penyelesaian dokumen administrasi kegiatan dan perlu dilakukan pemeriksaan dokumen yang lebih cermat

4

Tim Teknis melakukan koordinasi dan pendampingan intensif terhadap kelompok penerima manfaat di masing masing wilayah agar pekerjaan fisik kegiatan dapat dipercepat sehingga dapat segera dimanfaatkan

5

Melakukan koordinasi dengan provinsi dan kabupaten, serta dilakukan pendampingan terkait penyelesaian pelaporan MPO sesuai target waktu yang ditetapkan



Dokumentasi Kegiatan



Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Food Estate)

Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk penyediaan air tanaman serta memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang berasal dari air permukaan atau air tanah dan difasilitasi secara teknis sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani. Sumber-sumber air biasanya berada agak jauh dari lokasi budidaya pertanian seperti mata air, sungai dan sumber lainnya, diperlukan sebuah sistim yang dapat menjembatannya.

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Food Estate) ini berfokus pada pengembangan kegiatan Food Estate khususnya pengelolaan tata air mikro di **Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah**. Target kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Food Estate) tahun 2024 sebanyak **58 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 6.960.000.000**. Kegiatan tersebut memiliki **realisasi fisik sebanyak 58 unit (100%)** dan **realisasi anggaran sampai akhir Desember 2024 sebesar Rp. 6.960.000.000 (100,00%)**.

Realisasi Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Food Estate) Tahun 2024



Mini Polder
58 unit



Kendala dan Tindak Lanjut



Kendala

1

Proses pelaksanaan kegiatan baru bisa dilaksanakan di Bulan Juli 2024 karena menunggu proses revisi anggaran (Revisi DIPA)

2

Di beberapa lokasi progress pelaksanaan fisik di lapangan terkendala dikarenakan sudah memasuki musim penghujan, sehingga proses konstruksi mengalami keterlambatan

3

Masih terjadi keterlambatan dalam pelaporan MPO yang disebabkan oleh dokumen belum dilaporkan pada aplikasi MPO sesuai progress pelaksanaan kegiatan



Tindaklanjuti

1

Melakukan koordinasi dengan kabupaten untuk segera dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses pemberkasan dan pelaksanaan fisik di lapangan

2

Tim Teknis melakukan koordinasi dan pendampingan intensif terhadap kelompok penerima manfaat di masing masing wilayah agar pekerjaan fisik kegiatan dapat dipercepat sehingga dapat segera dimanfaatkan

3

Melakukan koordinasi dengan provinsi dan kabupaten, serta dilakukan pendampingan terkait penyelesaian pelaporan MPO sesuai target waktu yang ditetapkan





MINI POLDER FOOD ESTATE



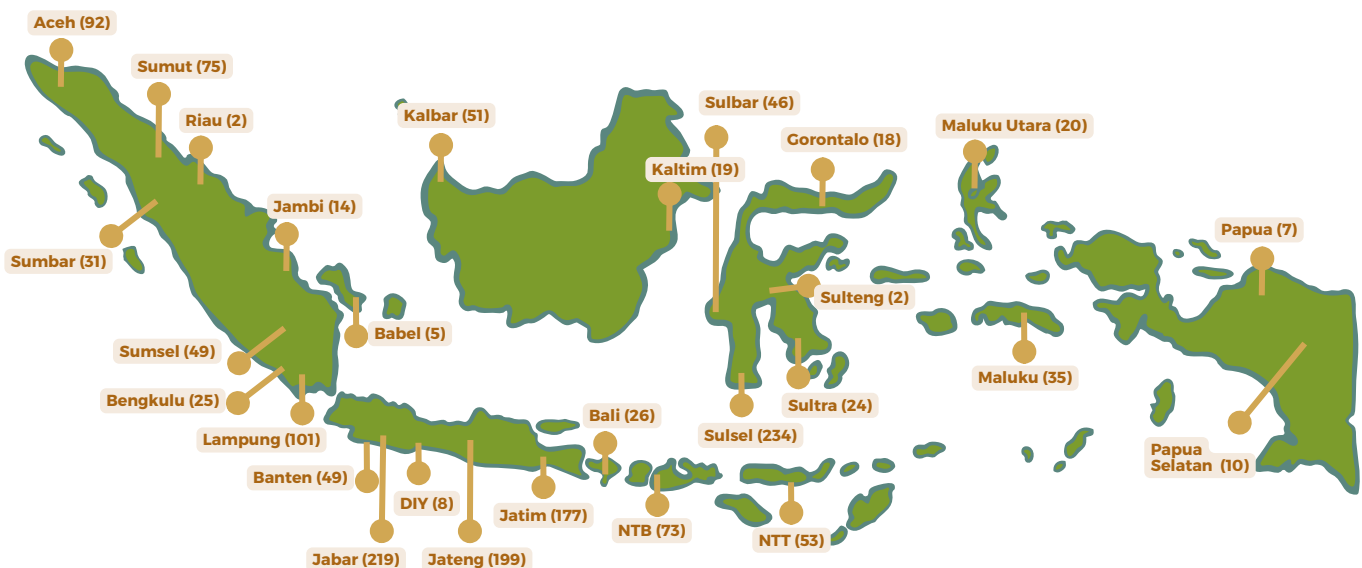
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian (RJIT)

Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier dilaksanakan pada petak tersier (identik dengan tingkat usaha tani). Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder) yang kondisinya baik dan/atau sudah direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Urusan Pengairan sesuai kewenangannya, serta jaringan irigasi desa. Disamping itu, selain lahan irigasi teknis dan irigasi desa lokasi kegiatan juga perlu diutamakan pada daerah yang sudah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sebagai informasi, alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah lain yang sulit dihindari sehingga berakibat adanya penurunan luas sawah Indonesia.

Secara teknis di lapangan, kegiatan RJIT sangat bermanfaat untuk memperlancar distribusi aliran air irigasi dan mengurangi kehilangan air pada saluran irigasi tingkat usaha tani. Adanya kerusakan pada saluran irigasi, berdampak terhadap upaya pemenuhan air irigasi yang terhambat.

Kegiatan RJIT TA 2024 di realokasi kepada daerah - daerah yang siap untuk melaksanakan kegiatan serta dengan memprioritaskan usulan - daerah aspirasi. Lokasi kegiatan tersebar di **28 provinsi** dengan alokasi **1.663 unit** dan total anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 124.725.000.000**. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp. 124.725.000.000 (100%)**, sedangkan realisasi fisik mencapai **1.663 unit (100%)**.

Realisasi Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) TA 2024



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Kendala dan Tindak Lanjut



Kendala

1. Terlambatnya Rekomendasi CPCL dari Dinas Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan layak oleh Tim Teknis.
2. Proses Pembukaan Rekening UPKK memakan waktu dikarenakan lokasi tempat tinggal Kelompok cukup jauh dari lokasi Bank.
3. Lambatnya proses konstruksi karena faktor cuaca menyebabkan laporan pertanggung jawaban belum selesai.



Tindaklanjut

1. Petugas Pusat melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas Kabupaten/Kota/Provinsi melalui upaya kesepakatan penyusunan jadwal percepatan kegiatan.
2. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui pendampingan petugas lapangan dan tim teknis, serta upaya peningkatan kemampuan SDM Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.





BAB III

DIREKTORAT
PERLINDUNGAN DAN
PENYEDIAAN LAHAN

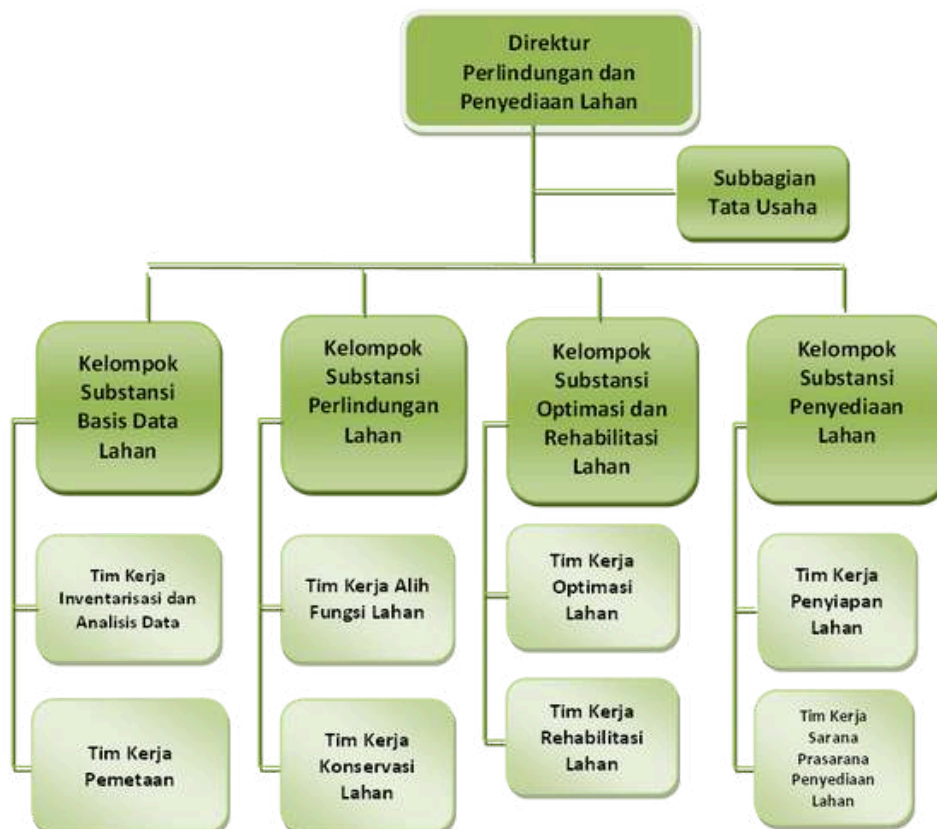
PAGU
ANGGARAN

REALISASI
ANGGARAN

Struktur

Organisasi

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan



Kinerja Anggaran

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.

Pada tahun 2024, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Pertanian telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.313.613.298.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.114.885.969.339 (91,41%). Rincian realisasi keuangannya yaitu sebagai berikut.

Realisasi Keuangan Kegiatan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Pertanian TA 2024

Kode	Nama Kegiatan / Output	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi		Outstanding Kontrak (Rp)	Total Realisasi	
				(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian		2.313.613.298.000	2.114.885.969.339	91,41	13.655.751.550	2.128.541.720.889	92,00
1795.AEA	Koordinasi	kegiatan	20.443.310.000	19.321.364.627	94,51	0	19.321.364.627	94,51
1794.AEA.001	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	kegiatan	20.443.310.000	19.321.364.627	94,51	0	19.321.364.627	94,51
1795.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		2.000.000.000	0	0,00	0	0	0,00
1795.RBK.004	Jalan Usaha Tani (MP Food Estate)	unit	2.000.000.000	0	0,00	0	0	0,00
1795.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan		2.172.299.603.000	2.000.786.845.324	92,10	266.596.550	2.001.053.441.874	92,12
1795.RBO.002	Optimasi Lahan		2.101.169.218.000	2.000.786.845.324	95,22	266.596.550	2.001.053.441.874	95,24
Belanja Jasa Kons	SID Optimasi Lahan Rawa	Ha	87.855.861.000	87.665.572.209	99,78	247.327.400	87.912.899.609	100,06
Perbaikan infrastr	Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan (Konstruksi dan Olah Tanah)		1.925.981.122.000	1.834.614.003.595	95,26	4.493.750	1.834.618.497.345	95,26
	Konstruksi Optimasi Lahan Rawa	Ha	1.614.330.697.000	1.584.859.965.362	98,17	1.493.750	1.584.861.459.112	98,17
	Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa	Ha	311.650.425.000	249.754.038.233	80,14	3.000.000	249.757.038.233	80,14
	Belanja Operasional Optimasi Lahan Rawa		54.216.980.000			14.775.400		
Perbaikan infrastr	Oplah dalam rangka penanganan Bencana Sumatera Barat	km2	5.727.000.000	78.507.269.520	90,28		78.522.044.920	90,30
	Operasional Oplah Sumbar	km2	511.413.000					
	SID Optimasi Lahan Rawa untuk 2025	km2	25.000.000.000			-		
	Operasional SID Opla Rawa 2025	kegiatan	1.500.000.000			-		
1795.RBO.003	Lahan Pertanian Pangan Produktif (MP Fa	km2	71.130.385.000	366.454.240	0,00	-	366.454.240	0,00
1795.RBR	Dokumen Teknis	dokumen	118.870.385.000	94.777.759.388	79,73	13.389.155.000	108.166.914.388	91,00
1795.RBR.001	SID Cetak Sawah	dokumen	118.870.385.000	94.777.759.388	79,73	13.389.155.000	108.166.914.388	91,00



Optimasi Lahan Rawa

Lahan rawa baik pasang surut maupun rawa lebak sangat berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian tanaman pangan khususnya lahan sawah. Total lahan rawa tersebut adalah sekitar 5,12 juta hektar, yang terdiri dari 1,19 juta hektar berada di kawasan APL, sekitar 1,18 juta hektar di kawasan HPK, dan 2,75 juta hektar berada di kawasan Hutan Produksi. Pemanfaatan lahan rawa, baik pasang surut maupun lebak telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian sawah. Namun, pemanfaatan lahan rawa tersebut tidak berjalan optimal. Sebagian besar sawah di lahan rawa memiliki Indeks Pertanaman yang rendah dan produktivitas yang juga rendah.

Kegiatan Optimasi Lahan Rawa terdiri dari tiga komponen kegiatan yaitu Survei Investigasi dan Desain (SID), Konstruksi dan Olah Tanah. Alokasi kegiatan Optimasi Lahan Rawa TA 2024 dilaksanakan di 12 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan. Kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut.

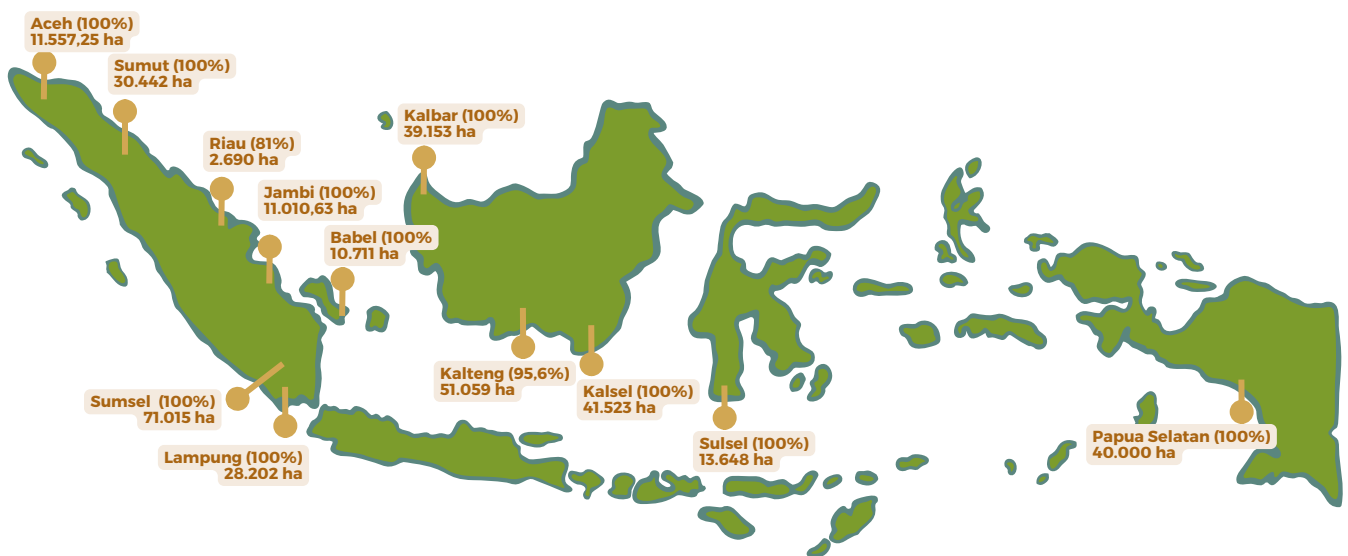
- Target Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan tahun 2024 seluas 353.971 ha dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.885.035.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.258.505.209 (99,28%).
- Target Konstruksi Optimasi Lahan tahun 2024 seluas 351.017 ha dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.614.330.697.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.581.095.660.386 (97,94%).
- Target Olah Tanah Optimasi Lahan tahun 2024 seluas 346.278,25 ha dengan pagu anggaran sebesar Rp. 311.650.425.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.245.166.792.233 (78,66%).



A. Survei Investigasi dan Desain (SID)

Kontrak SID dan SID telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan). Target Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan tahun 2024 seluas **353.971 ha** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 87.885.035.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 87.258.505.209 (99,28%)**. Kegiatan tersebut dialokasikan di 12 Provinsi dengan realisasi kontrak seluas **351.657 ha (99,35%)**, realisasi survei investigasi (SI) seluas **351.011 (99,82%)** dan realisasi desain seluas **351.011 (99,82%)**. Kendala pelaksanaan kegiatan SID antara lain curah hujan tinggi menyebabkan lahan tergenang dan menghambat penyelesaian SID sehingga pekerjaan SID baru dilaksanakan pada pertengahan tahun.

Realisasi Kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa TA 2024



Sumber Data: Laporan Kinerja Dit PPL TA 2024
Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran

Realisasi kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa yang tidak tercapai 100% yaitu pada provinsi sebagai berikut.

1.Provinsi Riau

- Kegiatan SID tidak bisa dilakukan di lokasi di Desa Sei Besar dan Desa Sei Panji 2 karena banjir, sehingga tidak memungkinkan tim surveyor untuk masuk ke lokasi dan melakukan pengukuran.
- Beberapa Lokasi SID sudah beralih sebagian menjadi lahan sawit yg sebelumnya masih IP 100, dan saat ini sudah tidak ditanam lagi karena berupa semak belukar dengan vegetasi tinggi sedangkan biaya pengolahan lahan tidak menampung biaya land clearing
- Ada pengurangan lokasi karena berada di luar lahan LBS (masuk kawasan perkebunan/hutan)

2.Provinsi Kalimantan Tengah

- Kegiatan SID dilakukan sesuai dengan usulan dari Dinas Pertanian tingkat kabupaten sebesar 51.059 ha. Sehingga capaian realisasi kegiatan SID sudah sesuai dengan luasan yang diusulkan.



B. Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Konstruksi optimasi lahan rawa telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan). Target Konstruksi Optimasi Lahan tahun 2024 seluas **351.017 ha** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 1.614.330.697.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.581.095.660.386 (97,94%)**. Kegiatan tersebut dialokasikan di 12 Provinsi dengan realisasi fisik konstruksi optimasi lahan rawa seluas **348.758 Ha (99,36 %)**.

Realisasi Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2024



Sumber Data: Laporan Kinerja Dit PPL TA 2024
Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran

Realisasi kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa yang tidak tercapai 100% yaitu pada provinsi sebagai berikut.

1.Provinsi Kalimantan Tengah

- Total pekerjaan konstruksi yang tidak terealisasi 100% adalah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan. Kekurangan pekerjaan fisik di Kabupaten Kapuas yaitu seluas 17 Ha. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.
- Selain Kabupaten Kapuas, pekerjaan yang tidak terealisasi 100% adalah Kabupaten Katingan. Kekurangan pekerjaan seluas 1,4 Ha. Hal ini dikarenakan SID yang tersedia hanya seluas 4.383,6 Ha, sehingga pekerjaan konstruksi mengikuti SID yang tersedia.

2.Provinsi Kalimantan Selatan

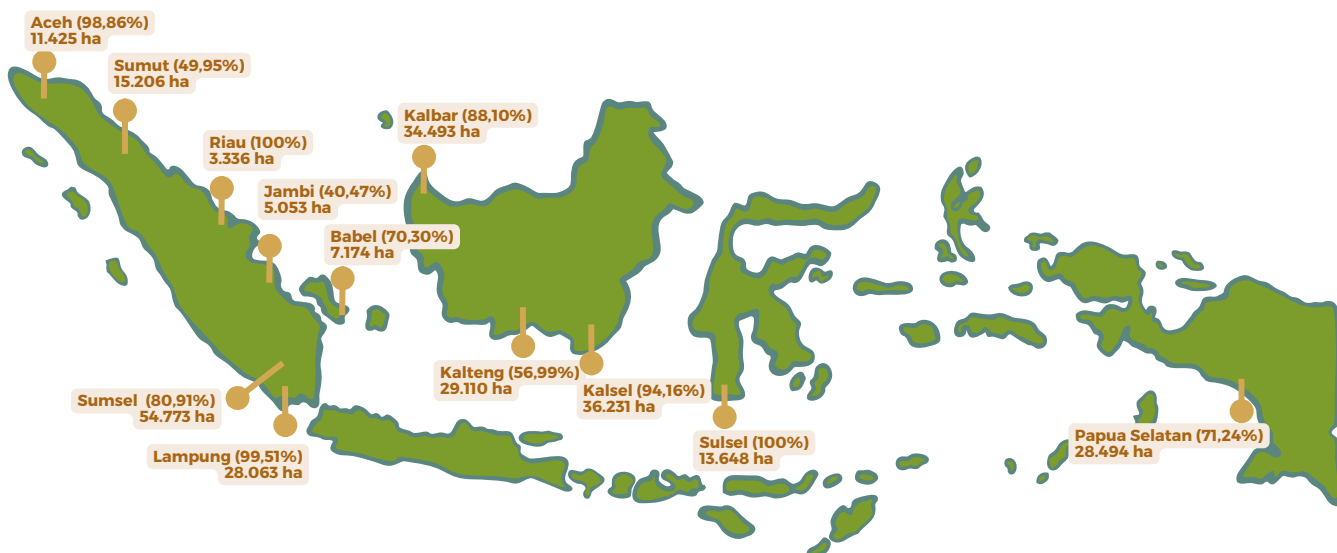
- Sebagian besar Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tidak terealisasi 100%, hanya Kota Banjarmasin yang terealisasi 100%. Beberapa lokasi yang tidak terealisasi 100% mengalami kendala antara lain:
 - Kontrak kerjasama baru dilaksanakan pada Bulan September 2024, sehingga waktu pengerjaannya hanya tiga bulan.
 - Beberapa lokasi tergenang air, sehingga alat berat kesulitan masuk ke lokasi kegiatan.



C. Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa

Kegiatan olah tanah telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Papua Selatan). Target Olah Tanah Optimasi Lahan tahun 2024 seluas **346.278,25 ha** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 311.650.425.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.245.166.792.233 (78,66%)**. Kegiatan tersebut dialokasikan di 12 Provinsi dengan realisasi fisik olah tanah optimasi lahan rawa seluas **267.005,18 Ha (77,11 %)**.

Realisasi Kegiatan Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa TA 2024



Sumber Data: Laporan Kinerja Dit PPL TA 2024
Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran

Realisasi kegiatan Olah Lahan Optimasi Lahan Rawa yang tidak tercapai 100% yaitu pada Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan karena berbagai kendala yaitu sebagai berikut.

- Pekerjaan konstruksi optimasi lahan baru selesai di akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pengajuan anggaran olah lahan.
- Beberapa lokasi tergenang air (banjir) sehingga tidak bisa dilakukan penanaman.
- Beberapa lokasi petani melakukan penanaman tanpa olah lahan (ToT).



Kendala dan Tindak Lanjut



Kendala

1

Keterbatasan SDM tim teknis di Kabupaten/Provinsi dalam hal menganalisis laporan hasil pengawasan kegiatan SID dan konstruksi

2

Beberapa lokasi tergenang sehingga menghambat pekerjaan di lapangan (kegiatan Survei dan Investigasi maupun pekerjaan konstruksi)

3

Terdapat lahan yang sudah beralih fungsi dari lahan pertanian ke lahan sawit atau kelapa yang berada pada areal yang sudah dilakukan SID tahun 2021

4

Terdapat realokasi anggaran pada pertengahan tahun, sehingga pekerjaan baru dimulai di pertengahan tahun di lokasi yang baru mendapatkan lokasi anggaran

5

Di beberapa lokasi, pekerjaan konstruksi dan pengolahan lahan baru bisa dikerjakan setelah musim panen selesai karena dikhawatirkan mobilisasi alat dan pengoperasian alat berat akan merusak pertanaman.



Tindaklanjuti

1

Menyusun rencanakegiatan dengan mencantumkan target waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan

2







Mendorong Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten untuk mengadakan pelatihan terhadap tim teknis di bidang konstruksi

3










Lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan para stakeholder, pembinaan dan pendampingan serta pengawalan pelaksanaan kegiatan SID, Konstruksi, Olah Tanah



Dokumentasi Kegiatan

Provinsi Aceh		
Kab. Aceh Jaya		
 <p>2 Jun 2024 15:57:34 4.83903312N 95.52578416E Sayeung Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya Aceh Altitude: 5.9m Speed: 0.0km/h Normalisasi Saluran Poktan Nahase Desa Gampong Baro, Kec. Darul Hikmah Index number: 71</p>	 <p>2 Jun 2024 08:50:21 4.83594257N 95.52473959E Pasi Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya Aceh Altitude: 7.0m Speed: 0.0km/h Normalisasi Saluran Poktan Nahase Desa Gampong Baro, Kec. Darul Hikmah Index number: 104</p>	 <p>2 Jun 2024 16:46:57 4.83833415N 95.52548448E Sayeung Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya Aceh Altitude: 15.2m Speed: 2.3km/h Normalisasi Saluran Poktan Nahase Desa Gampong Baro, Kec. Darul Hikmah Index number: 87</p>
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%
Kab. Aceh Utara		
 <p>5.0032N 97.3399E Desa Meurbo, Kec. Lhokseukon PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN TANAH Sta. 0 + 050</p>	 <p>5.0031N 97.3774E Desa Meurbo, Kecamatan Lhokseukon PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN TANAH Sta. 0 + 000</p>	 <p>5.0031N 97.3394E Kecamatan Lhokseukon, Kabupaten Aceh Utara Indonesia Desa Meurbo 24 Jun 2024 08:00:40</p>
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%
Kab. Aceh Barat		
 <p>13 Jul 2024 08:44:40.937 4.31808N 96.15479E Kabupaten Aceh Barat Kecamatan Bubon Desa Blangsebetong Poktan Iham Jaya Kegiatan Oplah Rawa 2024</p>	 <p>13 Jul 2024 10:05:37.136 4.31742N 96.15645E Kabupaten Aceh Barat Kecamatan Bubon Desa Blangsebetong Poktan Iham Jaya Kegiatan Oplah Rawa 2024</p>	 <p>13 Jul 2024 10:31:00.349 4.31713N 96.15653E Kabupaten Aceh Barat Kecamatan Bubon Desa Blangsebetong Poktan Iham Jaya Kegiatan Oplah Rawa 2024</p>
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%



Provinsi Sumatera Utara		
Kab. Deli Serdang		
		
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%
Kab. Asahan		
		
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%
Kab. Labuhan Batu Utara		
		
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%



Provinsi Riau		
Kab. Indragiri Hulu		
		
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%
Kab. Pelelawan		
		
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%
Kab. Kepulauan Meranti		
		
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%

Provinsi Jambi

Kab. Batanghari



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab.Tanjung Jabung Timur



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Kerinci



Foto 0%












Foto 50%



Foto 100%



Provinsi Lampung		
Kab. Lampung Tengah		
		
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%
Kab. Lampung Timur		
		
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%
Kab. Tulang Bawang		
		
Foto 0%	Foto 50%	Foto 100%

Provinsi Bangka Belitung

Kab. Bangka Barat



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Bangka Tengah



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Belitung Timur



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%



Provinsi Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Kayong Utara



Foto 0%



Foto 50%

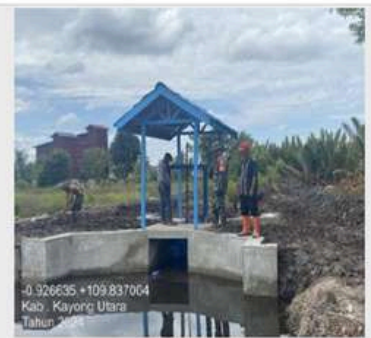


Foto 100%

Kab. Bengkayang



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%



Provinsi Kalimantan Tengah

Kab. Katingan



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Katingan



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Seruyan



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%



Provinsi Kalimantan Selatan

Kab. Barito Kuala



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Tanah Laut



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Tapin



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%



Provinsi Sulawesi Selatan

Kab. Pinrang



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Pinrang

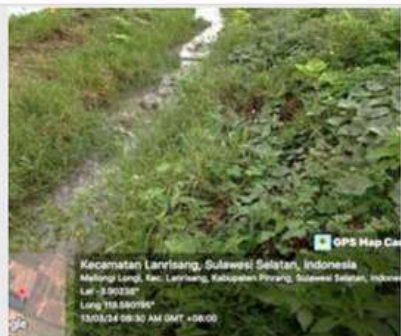


Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

Kab. Wajo



Foto 0%



Foto 50%

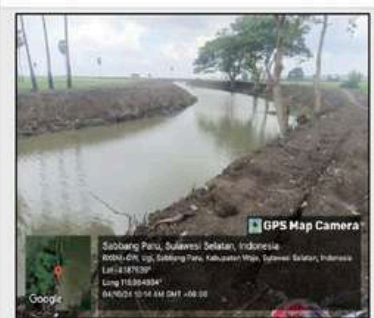


Foto 100%



Optimasi Lahan Rawa

dalam rangka penanganan

Bencana Sumatera Barat

Alokasi kegiatan konstruksi optimasi lahan penanganan bencana dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami bencana banjir lahar dingin dan banjir bandang dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 5.727.000.000,- atau seluas 690 ha. Realisasi keuangan kegiatan optimasi lahan penanganan bencana tercapai sebesar 4.623.100.000 (81%) dari target sebesar Rp. 5.727.000.000,-. Sedangkan realisasi fisik tercapai seluas 557 ha (81%) dari target seluas 690 ha. Realisasi tidak tercapai 100% di Kab. Pasaman, Kab. Padang Panjang dan Kab. Solok Selatan.

Realisasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa dalam rangka penanganan Bencana Sumatera Barat TA 2024



No	Kabupaten	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Ha	Rp	Ha	%	Rp	%
1	Agam	104	863.200.000	104	100	863.200.000	100
2	Pasaman	50	415.000.000	0	-	0	-
3	Pesisir Selatan	118	979.400.000	118	100	979.400.000	100
4	Tanah Datar	335	2.780.500.000	335	100	2.780.500.000	100
5	Padang Panjang	16	132.800.000	0	-	0	-
6	Solok Selatan	67	556.100.000	0	-	0	-
TOTAL		690	5.727.000.000	557	81	4.623.100.000	81



Kendala dan Tindak Lanjut



Kendala

1

Keterbatasan SDM tim teknis di Kabupaten/Provinsi dalam hal menganalisis laporan hasil pengawasan kegiatan SID dan konstruksi.

2

Kebijakan refocusing anggaran dilakukan mulai pertengahan tahun berpengaruh terhadap percepatan realisasi fisik dan keuangan.

3

Adanya pengaruh kondisi cuaca/iklim yang berubah-ubah (hujan/kering), serta sulitnya diprediksi musim hujan dan musim kemarau, maka menimbulkan hambatan dalam pekerjaan konstruksi saluran dan pembetonan.

4

Pelaksanaan konstruksi mundur karena keterlambatan kontrak pekerjaan dengan IPL/pihak pelaksana.

5

Beberapa lokasi tergenang air (banjir) sehingga tidak bisa dilakukan penanaman. Beberapa lokasi petani melakukan penanaman tanpa olah lahan (ToT).



Tindaklanjuti

1

Mendorong Dinas Pertanian provinsi/Kabupaten untuk mengadakan pelatihan terhadap tim teknis di bidang konstruksi.

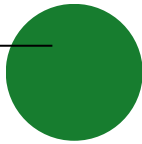
2

Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan secara intensif.

3

Penyusunan rencana kegiatan dengan mencantumkan target waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan.





Dokumentasi Kegiatan

Kab. Tanah Datar



Kab. Agam



BAB IV

DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN



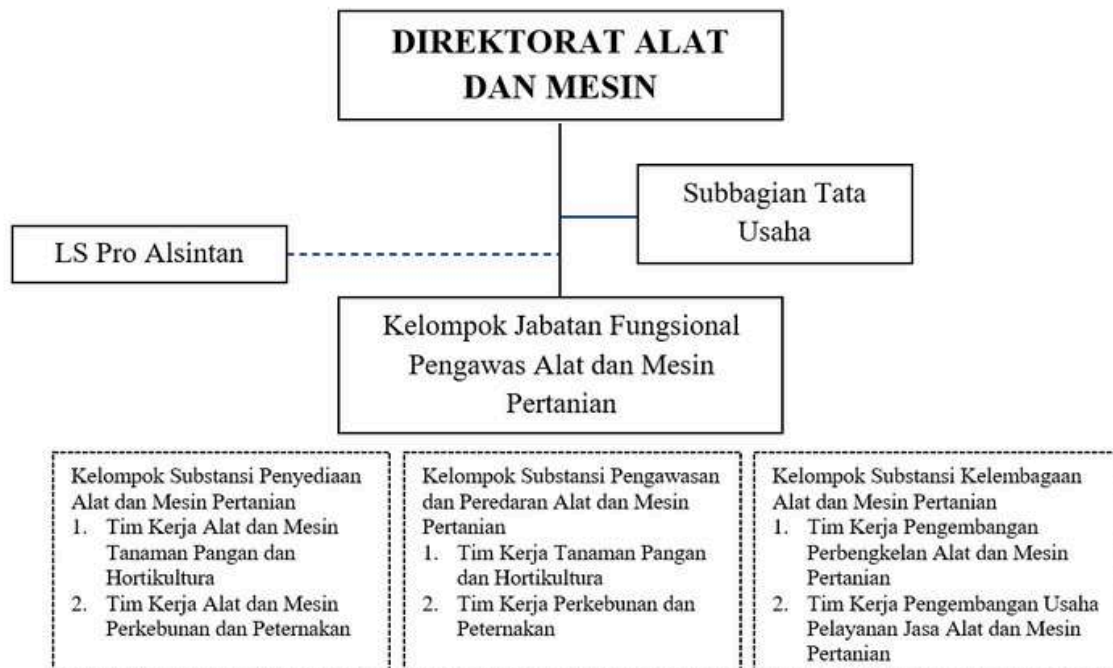
PAGU
ANGGARAN

REALISASI
ANGGARAN

Struktur

Organisasi

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian



Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi yaitu:

- perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pengawasan dan peredaran, serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.



Kinerja Anggaran

PAGU anggaran kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian pada tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 1.845.766.441.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.763.158.066.377,- (95,52%)**. Rincian realiasi per output kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian TA 2024 yaitu sebagai berikut.

Realisasi Keuangan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian TA 2024

Kode	Nama Kegiatan / Output	Pagu (Rp)	Realisasi		Outstanding Kontrak (Rp)	Total Realisasi	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1.845.766.441.000	1.763.158.066.377	95,52	0	1.763.158.066.377	95,52
1796.AEA	Koordinasi	48.542.901.000	40.922.334.373	84,30	0	40.922.334.373	84,30
	Pusat	28.657.901.000	23.019.209.448	80,32	0	23.019.209.448	80,32
	Daerah	19.885.000.000	17.903.124.925	90,03	0	17.903.124.925	90,03
1796.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.797.223.540.000	1.722.235.732.004	95,83	0	1.722.235.732.004	95,83
1796.RAG.001	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	1.797.073.540.000	1.722.125.332.004	95,83	0	1.722.125.332.004	95,83
	Bantuan Traktor Roda Empat	426.811.030.000	419.364.099.150	98,26	0	419.364.099.150	98,26
	Bantuan Traktor Roda Dua	214.230.810.000	210.024.720.100	98,04	0	210.024.720.100	98,04
	Bantuan Pompa Air	1.095.100.967.000	1.041.100.926.662	95,07	0	1.041.100.926.662	95,07
	Bantuan Hand Sprayer	16.474.716.000	16.179.272.500	98,21	0	16.179.272.500	98,21
	Bantuan Rice Transplanter	16.591.326.000	14.273.882.750	86,03	0	14.273.882.750	86,03
	Bantuan Traktor Crawler	10.269.399.000	10.269.399.000	100,00	0	10.269.399.000	100,00
	Operasional	17.595.292.000	10.913.031.842	62,02	0	10.913.031.842	62,02
1796.RAG.006	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (MP Food Estate)	150.000.000	110.400.000	73,60	0	110.400.000	73,60

Realisasi keuangan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2024 sebesar 95,52% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana tersebut merupakan efisiensi dari nilai kontrak pengadaan alat dan mesin pertanian prapanen. Sisa dana tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dikarenakan adanya kebijakan tidak dapat merevisi anggaran pada kegiatan yang sama apabila sudah digunakan.



Bantuan Traktor Roda Empat

Traktor adalah salah satu kendaraan alat berat yang biasa digunakan untuk membantu dalam bidang pertanian. Traktor didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah, atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian, seperti alat pengolah tanah (bajak, garu, rotari), alat penanam, khususnya penanam biji-bijian (*seeder*), alat pengangkut hasil pertanian dan sebagainya. Traktor roda empat merupakan salah satu jenis traktor andalan untuk mekanisasi pertanian terutama pada lahan yang cukup luas.

Traktor roda 4 sangat cocok digunakan di lahan sawah, lahan kering atau tadah hujan dengan skala luas dan datar. Tanpa alat ini, pekerjaan berat di lahan pertanian harus dilakukan secara manual sehingga memakan waktu dan tenaga kerja. Dengan penggunaan traktor roda 4, pekerjaan seperti membajak tanah, menanam benih, dan bahkan memanen hasil pertanian bisa dilakukan dengan lebih efisien.

Pada tahun 2024, target penyediaan traktor roda 4 sebanyak **1.241 unit** dengan PAGU anggaran sebesar **Rp. 426.811.030.000,-**. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian 100% (1.241 unit) untuk fisik dan 98,26% atau Rp. 419.364.099.150,- untuk keuangan. Traktor roda 4 ini dialokasikan di 30 Provinsi di seluruh Indonesia.

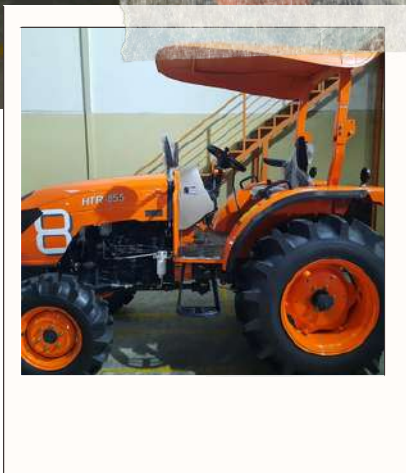
Sebaran Bantuan Traktor Roda 4 TA 2024



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Dokumentasi Kegiatan



Traktor Roda 4



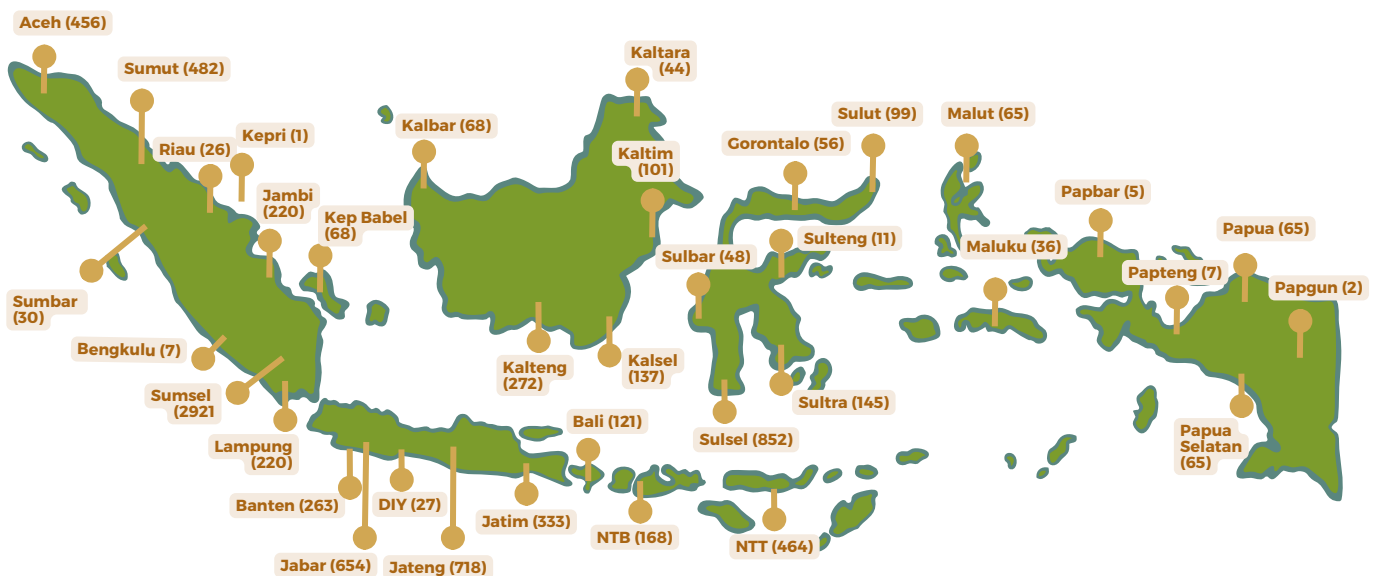
Bantuan Traktor Roda Dua

Pengolahan tanah dalam rangka persiapan lahan pertanian dapat dilakukan dengan membajak menggunakan hewan seperti kerbau dan sapi, namun hal ini dianggap kurang efektif. Maka dari itu, penggunaan traktor tangan dalam pengolahan tanah dirasa perlu digunakan. Traktor roda 2 adalah traktor dengan tenaga penggerak dari motor diesel (atau bensin) dengan didukung dua buah roda (biasanya terdapat tambahan 1 buah roda kecil di bagian belakang). Traktor ini umumnya dimanfaatkan untuk bekerja di lahan sawah, atau pada lahan yang lembab atau basah dan tidak terlalu kering dengan petakan lahan yang sempit.

Dengan penggunaan traktor sebagai sumber tenaga dalam pengolahan tanah, diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses pengolahan tanah, kapasitas kerja menjadi lebih tinggi dan pendapatan petani bertambah, sehingga dapat dilaksanakan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yang sempurna.

Pada tahun 2024, target penyediaan dan penyaluran Traktor Roda 2 sebanyak **6.563 unit** dengan PAGU anggaran sebesar **Rp. 214.230.810.000,-**. Realisasi fisik kegiatan ini sebanyak **6.563 unit (100%)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 210.024.720.100,- (98,04%)**. Bantuan Traktor roda 2 ini dialokasikan di 35 Provinsi.

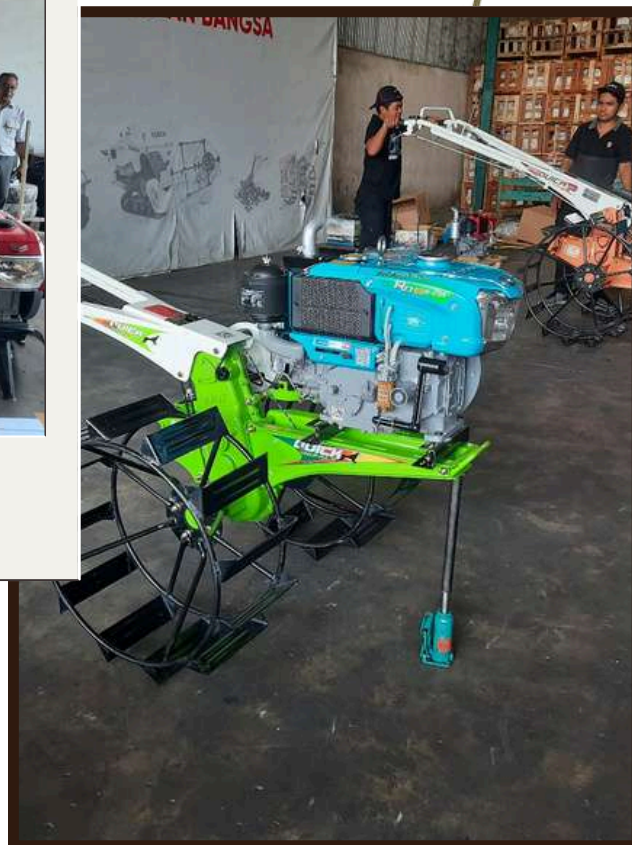
Sebaran Bantuan Traktor Roda 2 TA 2024



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Dokumentasi Kegiatan



traktor roda 2



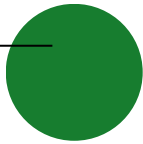
Bantuan Pompa Air

Pompa adalah perangkat yang beroperasi dengan mengubah energi mekanik menjadi energi kinetik, digunakan untuk mengalirkan fluida dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pompa air mempunyai peran yang sangat penting diantaranya untuk penyediaan air bersih, irigasi pertanian, industri dan pengendalian banjir. Peranan pompa air dalam irigasi pertanian adalah memungkinkan penggunaan air yang efisien dan efektif, memastikan bahwa tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup untuk budidaya pertanian. Keberadaan pompa air ini mampu membantu meringankan beban kerja harian untuk proses pengairan.

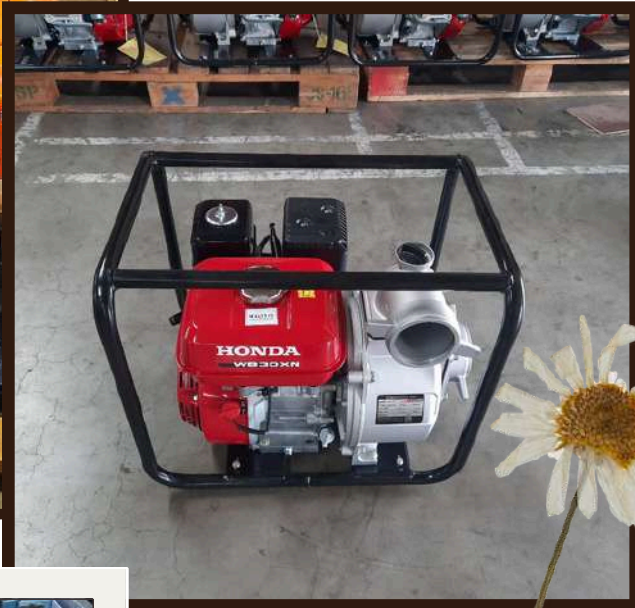
Pada tahun 2024, dalam menghadapi bencana kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan maka Kementerian Pertanian mengambil langkah cepat dengan pompanisasi. Pompanisasi merupakan solusi tercepat untuk mengatasi kekeringan di sektor pertanian. Bantuan pompa air ini juga untuk mendukung Kegiatan Penambahan Areal Tanam (PAT) Padi. Target Pompa Air tahun 2024 sebanyak **62.388 unit** dengan PAGU anggaran sebesar **Rp.1.095.250.967.000,-**. Realisasi fisik kegiatan ini sebanyak 62.388 unit (100%) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.041.211.326.662 (95,07%)** yang dialokasikan di **38 Provinsi** seluruh Indonesia.

Sebaran Bantuan Pompa Air TA 2024





Dokumentasi Kegiatan



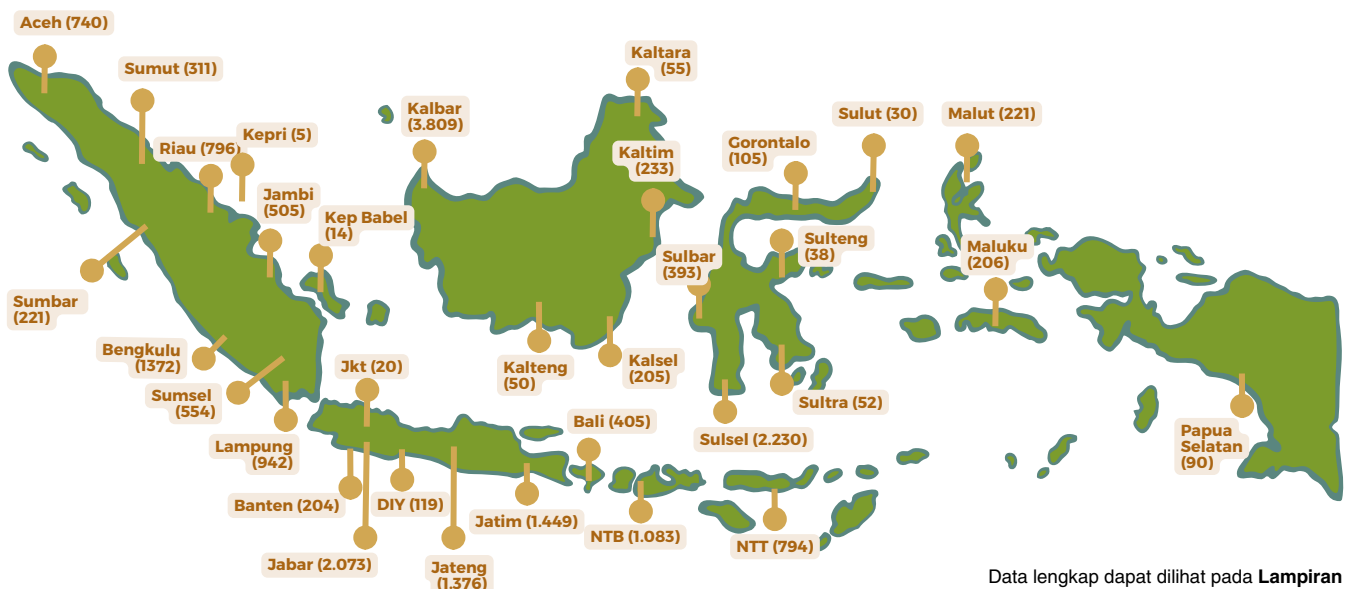
pompa air



Bantuan Hand Sprayer

Sprayer atau yang dikenal juga sebagai alat penyemprot, adalah alat yang dirancang untuk mengaplikasikan pestisida, pupuk, dan berbagai bahan kimia pertanian lainnya secara merata ke tanaman. Fungsi *sprayer* selain untuk penyemprotan pestisida dan pupuk, juga dapat digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Penggunaan *sprayer* juga harus dilakukan dengan bijak dan memperhatikan faktor keamanan. Petani harus memahami cara menggunakan alat *hand sprayer* dan memperhatikan dosis cairan yang tepat, jarak semprot, dan waktu penyemprotan untuk memastikan hasil yang maksimal dan menghindari kerugian serta tidak membahayakan kesehatan mereka sendiri. Salah satu jenis *sprayer* yang beredar luas adalah *hand sprayer*. Meskipun petani sudah banyak yang memiliki *hand sprayer*, Pemerintah masih memberikan bantuan *hand sprayer* kepada masyarakat tani untuk pengendalian hama apabila terjadi serangan organisme pengganggu tanaman.

Pada tahun 2024, target penyediaan *hand sprayer* sebanyak **20.700 unit** dengan PAGU anggaran sebesar **Rp. 17.474.716.000,-** dengan realisasi fisik sebanyak **20.700 unit (100%)** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 16.179.272.500,- (98,21%)**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **33 Provinsi**.





handsprayer



Bantuan Rice Transplanter

Mesin penanam padi atau disebut *rice transplanter* adalah mesin tanam padi yang digunakan dengan cara bibit padinya di semai dahulu pada dapog (tray) sekitar 15 – 20 hari. Dapog adalah kotak semai dimana tempat tumbuhnya bibit padi yang ditanam secara acak atau ditabur pada media tanam (media tumbuh).

Penggunaan *rice transplanter* dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi proses tanam. Dengan menggunakan mesin ini, petani dapat menanam bibit padi dalam jumlah besar dengan cepat dan tepat, serta tenaga kerja yang lebih sedikit dibanding metode tradisional sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Penggunaan mesin ini juga memungkinkan penanaman yang lebih konsisten dan merata.

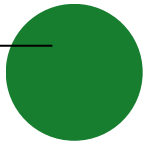
Target penyediaan dan penyaluran *Rice Transplanter* pada tahun 2024 sebanyak **186 unit** dengan PAGU anggaran sebesar **Rp. 16.591.326.000,-**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **12 Provinsi** dengan realisasi fisik sebanyak **186 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2024 sebesar **Rp. 14.273.882.750,- (86,03%)**.

Sebaran Bantuan Rice Transplanter TA 2024

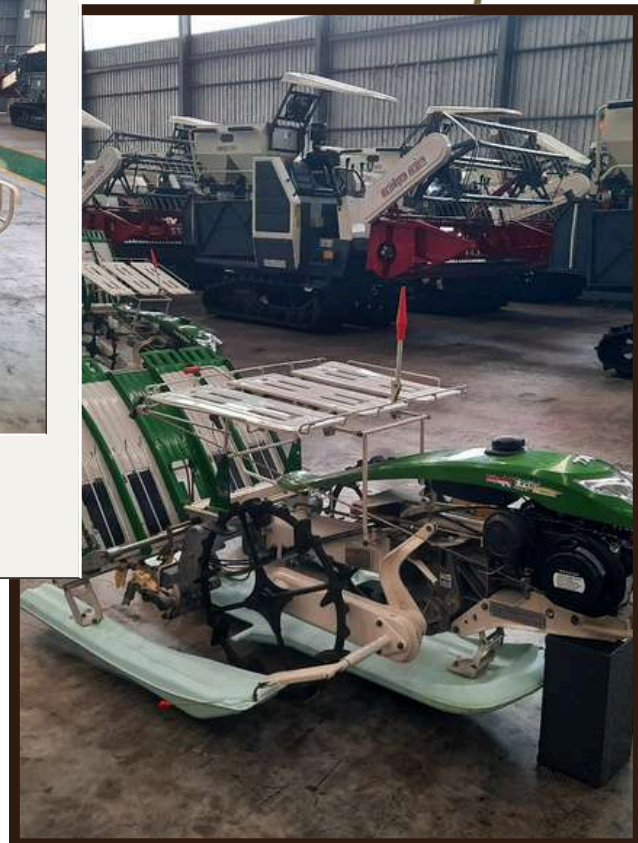


Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Dokumentasi Kegiatan



Rice transplanter



Bantuan Traktor Roda Crawler

Traktor Roda Crawler yaitu traktor yang penggerakannya berupa roda rantai. Roda rantai yaitu tipe penggerak yang berupa sabuk atau rantai panjang dan lebar yang kedua ujungnya saling terhubung dan digerakkan dengan banyak roda gigi di dalamnya. Contoh umum kendaraan dengan penggerak rantai adalah tank dan buldozer. Traktor tipe ini bisa digunakan pada tanah yang kering dan berpasir atau tanah bersalju di mana roda biasa memiliki risiko untuk selip. Bahan yang digunakan untuk membuat sabuk atau rantai biasanya berupa baja atau karet. Yang saat ini umum digunakan adalah yang terbuat dari karet, karena memiliki elastisitas yang cukup sehingga mengurangi terjadinya pemadatan tanah.

Target Traktor Roda Crawler tahun 2024 sebanyak **30 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp.10.269.399.000,-**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **4 Provinsi** dengan realisasi fisik sebanyak **30 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2024 sebesar **Rp. 10.269.399.000,- (100%)**.

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Traktor Crawler TA 2024



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



traktor crawler



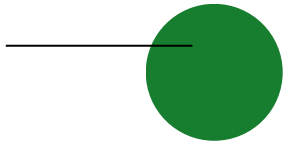
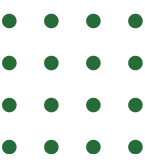
UPJA - Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian

Keberadaan UPJA di daerah sentra produksi tidak saja menjadi solusi dalam mengatasi kebutuhan alsintan bagi petani untuk mengolah lahan pertanian, pengairan, panen dan pasca panen, tetapi juga menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan tenaga kerja di perdesaan. Fungsi utama kelembagaan UPJA yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan dalam penanganan budidaya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan; perlindungan tanaman termasuk pengendalian kebakaran; maupun kegiatan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian seperti jasa pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi; termasuk mendorong pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, daya saing dan perbaikan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2024 ini bersinergi dengan Program IMMAGo dari BPSDM, dilakukan identifikasi dan inventarisasi data UPJA yang ada di wilayah Indonesia. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi UPJA ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai UPJA saat ini. Dengan adanya data yang lengkap dan update ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pada perencanaan dan pengambilan kebijakan pengembangan alat dan mesin pertanian di masa mendatang.

Sebaran Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Tahun 2024





Pengawasan dan Peredaran

Alat dan Mesin Pertanian

Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian terdiri dari Pengawasan Peredaran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian di Tingkat Penerima, dan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian.



Pengawasan Peredaran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian di Tingkat Penerima

Pada TA. 2024 telah disalurkan bantuan alat dan mesin pertanian prapane sebanyak 91.108 unit ke titik bagi yaitu dinas lingkup pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Setelah tiba di titik bagi maka Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mendistribusikannya ke penerima manfaat yaitu Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA dan Brigade. Bukti pertanggungjawaban bahwa alat telah diterima oleh penerima bantuan adalah Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kelompok penerima bantuan sesuai dengan SK Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian TA. 2024 yang dilakukan *input* dan *upload* dalam aplikasi DITA Tahun 2024

Dari hasil *input* dan *upload* dokumen dapat diketahui bahwa alat yang telah didistribusikan kepada kelompok penerima bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 63.625 unit atau 69,83% dari 91.108 unit.

Rekapitulasi Penyelesaian BASTB Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian melalui Aplikasi DITA Tahun 2024

30,17% terdistribusi namun belum terinput



69,83% terdistribusi dan terinput



LS PRO

Alat dan Mesin Pertanian



Sertifikasi LS Pro Alat dan Mesin Pertanian

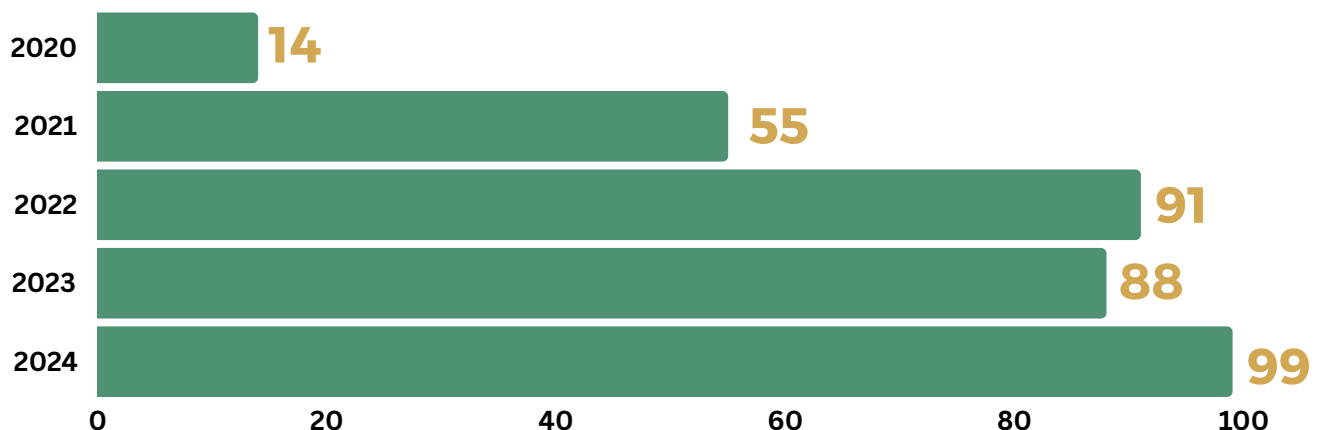
Sertifikasi merupakan sebuah kegiatan untuk meraih suatu pengesahan dalam bentuk sertifikat kesesuaian, yang menyatakan bahwa sebuah produk telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga yang independen yang telah diakui kompetensinya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yaitu LS Pro Alsintan. Produsen bisa mendapatkan sertifikat tanda SNI melalui suatu proses yang dilakukan oleh LS Pro Alsintan yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkupnya. Produsen dapat mengajukan permohonan kepada LS Pro Alsintan untuk proses sertifikasi. Permohonan tersebut akan di proses oleh LS Pro Alsintan dan akan diberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) apabila sudah memenuhi persyaratan SNI.

LS Pro Alsintan yang berada pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan audit eksternal yaitu audit yang dilakukan kepada pemohon sertifikasi tentang pelaksanaan sistem mutu dengan acuan yang digunakan. Pada tahun 2024, LS Pro Alsintan telah menerima permohonan sebanyak 146 merek tipe model permohonan sertifikasi dan telah menerbitkan SPPT SNI sebanyak 99 merek tipe model yang berasal hasil evaluasi sertifikasi dari lanjutan permohonan sertifikasi tahun 2023 dan tahun 2024.



SPPT SNI yang telah diterbitkan tahun 2020 - 2024

● Sertifikat Produk



BAB V

DIREKTORAT
PUPUK DAN PESTISIDA



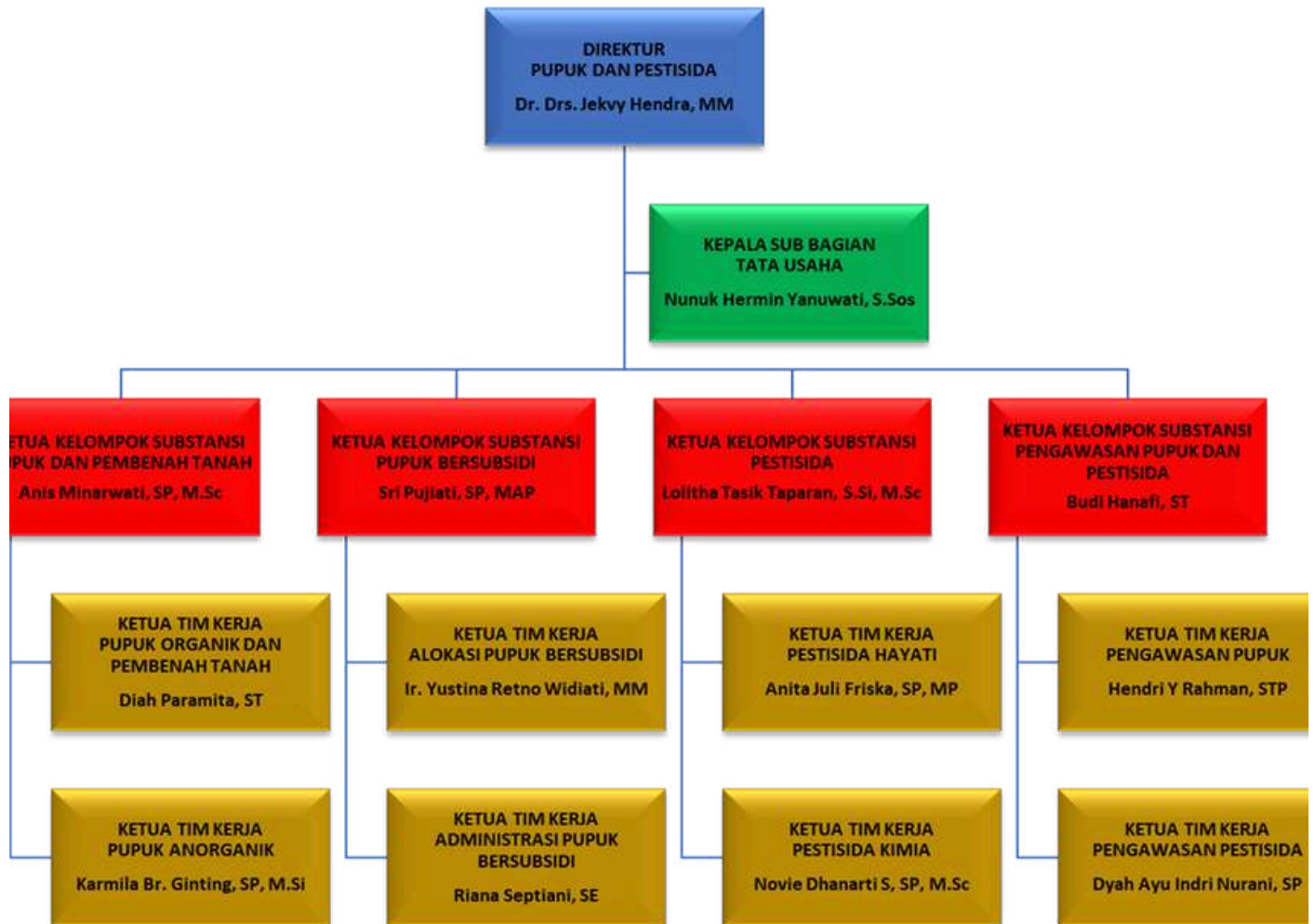
PAGU
ANGGARAN

REALISASI
ANGGARAN

Struktur

Organisasi

Direktorat Pupuk dan Pestisida



Kinerja Anggaran

Pada tahun 2024, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pupuk dan Pestisida telah dialokasikan anggaran melalui DIPA APBN Nomor : DIPA-018.08.1.633656/2024 Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp. 260.000.000.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 186.991.170.000,-. Adapun rincian anggarannya sebagaimana tabel berikut :

Realisasi Keuangan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Pupuk dan Pestisida TA 2024

Kode	Nama Kegiatan / Output	Pagu (Rp)	Realisasi		Outstanding Kontrak (Rp)	Total Realisasi	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	186.991.170.000	124.253.418.083	66,45	0	124.253.418.083	66,45
3993.AEA	Koordinasi	2.799.876.000	2.538.404.205	90,66	0	2.538.404.205	90,66
3993.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan[Base Line]	7.608.080.000	6.835.925.314	89,85	0	6.835.925.314	89,85
3993.FAB.001	Sistem Informasi Pupuk Bersubsidi	7.608.080.000	6.835.925.314	89,85	0	6.835.925.314	89,85
3993.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	176.583.214.000	114.879.088.564	65,06	0	114.879.088.564	65,06
3993.RAG.003	Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	176.583.214.000	114.879.088.564	65,06	0	114.879.088.564	65,06
3993.001.001.001	Dolomit	148.733.202.000	102.995.254.775	69,25	0	102.995.254.775	69,25
3993.001.001.001.002	Dolomit (1000 kg/ha)	12.750.000.000	1.618.000.000	12,69	0	1.618.000.000	12,69
3993.001.001.001.003	Senyawa Humat (3 kg/ha)	1.346.400.000	201.600.000	14,97	0	201.600.000	14,97
3993.001.001.001.004	Pupuk Mikro	757.350.000	228.478.500	30,17	0	228.478.500	30,17
3993.001.001.001.005	Dekomposer (5 Lt/ha)	1.833.450.000	0	0,00	0	0	0,00
3993.001.001.001.006	Herbisida (3 Lt/ha)	1.162.800.000	56.750.000	4,88	0	56.750.000	4,88
	Belanja Operasional	10.000.012.000	9.779.005.289	97,79	0	9.779.005.289	97,79

Pagu anggaran kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 186.991.170.000 dengan realisasi sampai akhir Desember 2024 sebesar Rp.124.253.418.083 (66,45%). Rincian pagu per output kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida TA 2024 yaitu sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut.

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida



Penyediaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian

Intensifikasi lahan rawa untuk pertanian tanaman pangan, khususnya padi, sangat memerlukan ameliorant Dolomit sebagai titik unkit untuk mengangkat produktivitas padi. Tujuan utama pemberian Dolomit adalah meningkatkan pH tanah sampai tingkat yang sesuai untuk pertumbuhan akar tanaman, menurunkan konsentrasi unsur beracun sampai batas aman bagi tanaman serta memperkaya basa-basa dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh sehat. Sebagai ameliorant, Dolomit memiliki keunggulan dibanding kalsit karena mengandung unsur hara Mg, selain unsur Ca dan daya netralitas keasamannya 9 % lebih tinggi dibanding Kaptan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah dalam melindungi produksi tanaman pertanian khususnya tanaman pangan, maka pada tahun anggaran 2024 diadakan kegiatan Penyediaan Dolomit mendukung Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. Hal ini dimaksudkan untuk dukungan Kementerian Pertanian terhadap ketahanan pangan nasional, juga sebagai penguatan petani pada saat harga pupuk dan pestisida meningkat tajam sebagai imbas dari krisis energi dunia.

Penyediaan dolomit dilaksanakan melalui kegiatan banpem barang dengan titik bagi di kelompok tani/gapoktan. Pemilihan penyedia dolomit dilakukan melalui eCatalog sectoral. Target awal untuk kegiatan ini adalah untuk menyediakan dolomit di 400.000 ha lahan rawa. Kemudian berdasarkan hasil revisi DIPA sebanyak 2 kali maka target menurun menjadi 351.017 Ha. Di dalam pelaksanaannya, cpcl kegiatan penyediaan dolomit sangat bergantung kepada kesiapan/ relisasi cpcl konstruksi kegiatan optimasi lahan. Oleh karena itu saat kegiatan optimasi lahan terealisasi < 100% maka begitu juga dengan realisasi penyediaan dolomit.



Kegiatan penyediaan saprodi merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan pilot percontohan pengembangan lahan pertanian pangan produktif dalam rangka pemanfaatan lahan cetak sawah untuk budi daya padi dan peningkatan produksi padi. Penyediaan saprodi yang dibutuhkan untuk lahan percontohan seluas 800 ha target awal adalah dolomit dan herbisida dan kemudian ditambahkan 2 jenis pupuk mikro (Cu, Zn), senyawa humat dan dekomposer.

Di dalam perjalanan pelaksanaannya terjadi revisi sehingga yang muncul saprodi yang disediakan adalah dolomit, mikro majemuk (Cu dan Zn), senyawa humat dan hebisida. Sedangkan untuk lahan yang mendapat saprodi menjadi 500 ha. Khusus untuk herbisida, penyediaan hanya di 300 ha karena untuk 200 ha mendapat bantuan langsung dari perusahaan pestisida (CSR). Dekomposer tidak disediakan karena lahan yang menjadi lokasi untuk disediakan saprodi sudah lahan yang siap olah sehingga sudah tidak memerlukan dekomposer yang biasa digunakan untuk menghancurkan rumput/ tanaman pengganggu di permukaan lahan. Pupuk mikro yang disediakan adalah mikro majemuk untuk lebih menambah unsur hara di lahan cetak sawah.

Mekanisme penyediaan dolomit dilaksanakan melalui kegiatan banpem barang dengan titik bagi di kelompok tani/ gapoktan. Dosis saprodi untuk piloting cetak sawah antara lain dolomit 1Ton/ha, senyawa humat 3 kg/ha, mikro majemuk 1,2 kg/ha dan herbisida 1L/ha. Pemilihan penyedia dolomit dilakukan melalui eCatalog sectoral



Target kegiatan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp.176.583.214.000 dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2024 sebesar Rp. 114.879.088.564 (65,05%). Kegiatan tersebut dialokasikan menjadi beberapa jenis banpem yaitu:

- Dolomit memiliki target sejumlah 6.426 unit dan realisasi fisik sejumlah 54.240 ton. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 161.483.202.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.613.254.775 (64,78%).
- Senyawa Humat memiliki target sejumlah 153 unit dan realisasi fisik sejumlah 2400 kg. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.346.400.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 201.600.000 (14,97%).
- Pupuk Mikro memiliki target sejumlah 153 unit dan realisasi fisik sejumlah 960 kg. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 757.350.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 228.478.500 (30,17%).
- Dekomposer memiliki target sejumlah 255 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.833.450.000 namun tidak terealisasi.
- Herbisida memiliki target sejumlah 153 unit dan realisasi fisik sejumlah 500 kg. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.162.800.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.750.000 (4,88%).



Kendala dan Tindak Lanjut



Kendala

- Kegiatan Penyediaan dolomit mendukung kegiatan OPLA sehingga dalam pelaksanaannya CPCL menunggu hasil SID dan OPLA
- Pada awalnya kegiatan ini direncanakan selesai pada Bulan Juni 2024, tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan sampai desember 2024, sehingga perlu dilakukan perubahan Juknis.
- Beberapa Daerah (Kabupaten) menyampaikan penolakan atas penyediaan dolomit pada lahan OPLA dengan justifikasi antara lain; mendapatkan bantuan dolomit dari anggaran APBD II, SID tidak tersedia, pH normal dan banjir.



Tindaklanjut

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Direktorat PPL dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten Kota baik secara langsung maupun online
- Percepatan Klik, kontrak dan pengiriman
- Memproses semua CPCL yang masuk dari kegiatan OPLA
- Melakukan sinkronisasi data OPLA yang sudah melakukan kontrak konstruksi sebagai target percepatan



DOKUMENTASI



Pendaftaran Perizinan Pupuk dan Pembenah Tanah

Pendaftaran pupuk dan pembenah tanah bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari akibat penggunaan pupuk dan pembenah tanah yang berbahaya serta untuk menjamin mutu dan efektifitas pupuk dan pembenah tanah yang akan di gunakan oleh petani. Pendaftaran pupuk dan pembenah tanah telah dilaksanakan 100% secara *online* mulai dari tahun 2014. Sejak saat itu telah dilakukan berbagai perbaikan dan pengembangan serta penambahan fitur dalam rangka membantu mempermudah pemohon pendaftaran pupuk dan pembenah tanah.

Pada tahun 2024, Direktorat Pupuk dan Pestisida menargetkan mengeluarkan rekomendasi SK Pendaftaran Pupuk Anorganik sebanyak 300 SK dan rekomendasi SK Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah sebanyak 210 SK. 10 SK. SK yang terealisasi untuk Pupuk Anorganik sebanyak 857 SK dan Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah sebanyak 482 SK dengan rincian sebagai berikut : yang terealisasi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pupuk Anorganik	Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah
1	SK Pendaftaran Pupuk	677	404
2	Surat Pengantar Uji Mutu	596	948
3	Surat Pengantar Uji Efektivitas	796	793
4	SK Pengalihan No Pendaftaran	25	14
5	SK Perubahan Nama Dagang	22	19
6	SK Perubahan Kemasan	107	42
7	SK Perubahan Produsen	22	3
8	SK Perubahan Warna	4	0
9	Surat Ijin Pesanan Khusus	428	0
Jumlah		857	482



DOKUMENTASI



BAB VI

DIREKTORAT
PEMBIAYAAN PERTANIAN



PAGU
ANGGARAN

REALISASI
ANGGARAN

Struktur

Organisasi

Direktorat Pembiayaan Pertanian



Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., MAB
DIREKTUR PEMBIAYAAN PERTANIAN

Puguh Hari Prabowo, SE, MAP
Kepala Subbagian Tata Usaha
Direktorat Pembiayaan Pertanian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Inda Fathru Rohani, S.T.
Ketua Kelompok Substansi
Kelembagaan Pembiayaan

Hamid Sangadji, S.P, M.P.
Ketua Kelompok Substansi
Kredit Program dan Fasilitas Pembiayaan

Siswoyo, MP.
Ketua Kelompok Substansi
Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian

Sulisyanto, S.E., MAP.
Ketua Tim Kerja
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

ISantosa Raharjo, S.P., M.Si
Ketua Tim Kerja
Kredit Program

Tuti Rahayu, S.E.
Ketua Tim Kerja
Pemberdayaan Permodalan

Anton Wahyu, S., S.P., M.M.
Ketua Tim Kerja
Koperasi Pertanian

Rizki Hermawan, S.E.I, MP.
Ketua Tim Kerja
Fasilitas Pembiayaan

Muhamad Amin, SAB
Ketua Tim Kerja
Asuransi Pertanian



Kinerja Anggaran

Kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian mempunyai fungsi untuk mengatasi beberapa isu strategis terkait dukungan aspek pembiayaan terhadap pembangunan pertanian yaitu sulitnya aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan, baik yang disebabkan oleh minimnya informasi tentang skim pembiayaan yang dapat diakses petani maupun yang disebabkan oleh penggolongan usaha pertanian sebagai usaha yang tidak *feasible* dan beresiko tinggi oleh lembaga pembiayaan.

Kegiatan utama Direktorat Pembiayaan Pertanian yaitu:

- Fasilitasi pembiayaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (KUA), dan Fasilitasi Pembiayaan non program;
- Pemberdayaan dan penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian (Koptan);
- Pelaksanaan asuransi pertanian yaitu Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP); dan
- Pemberdayaan Permodalan.

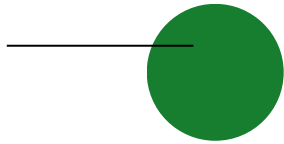
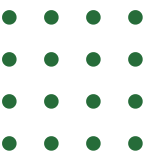
Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan dalam rangka mendukung program Kementerian Pertanian mencapai swasembada pangan menuju lumbung pangan nasional 2045.

Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian tahun 2024 mendapatkan pagu sebesar Rp43.713.400.000,- dengan realisasi anggaran per akhir Desember 2024 adalah sebesar Rp43.694.661.248 (99,96%).

Realisasi Keuangan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian TA. 2024

Kode	Nama Kegiatan / Output	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	43.713.400.000	43.694.661.248	99,96
3994.AEA	Koordinasi	563.000.000	560.831.553	99,61
3994.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.150.400.000	43.133.829.695	99,96
3994.RBK.001	Asuransi Pertanian	43.150.400.000	43.133.829.695	99,96
	Pelaksanaan asuransi pertanian	3.002.336.000	2.985.765.695	99,45
	Pusat	2.582.336.000	2.572.398.150	99,62
	Daerah (12 Satker)	420.000.000	413.367.545	98,42
	Bantuan Premi Asuransi Pertanian	40.148.064.000	40.148.064.000	100,00





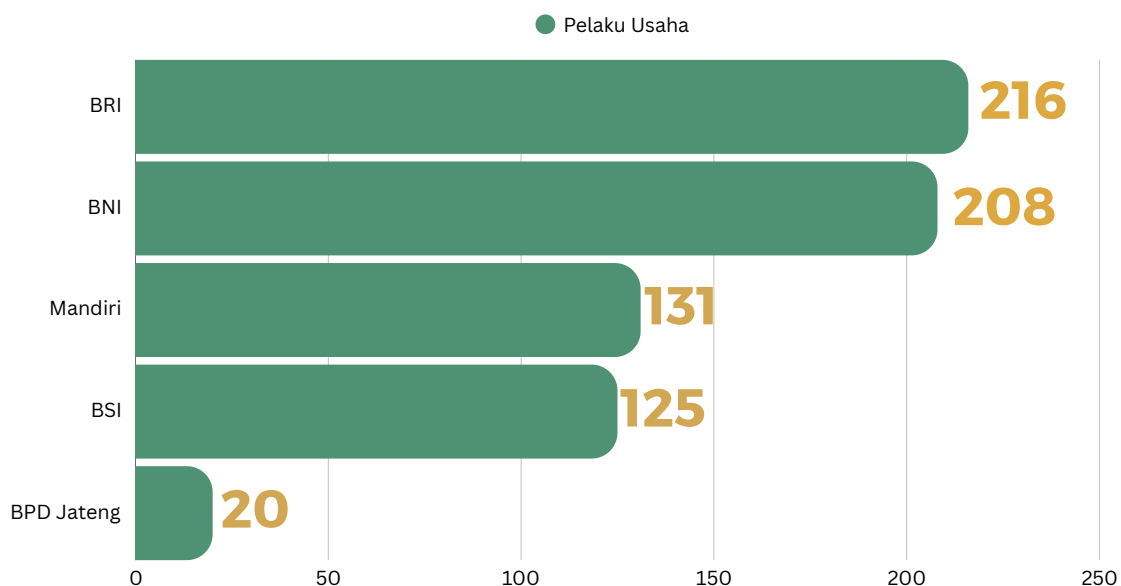
Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui Kredit Program

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu skema pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada debitur (calon penerima) yang memiliki usaha produktif dan layak, termasuk sektor pertanian namun belum memiliki agunan tambahan yang mencukupi. Skema kredit ini disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang ditugaskan.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian mencapai **Rp91.181.742.142.241** atau **91,18%** dari target. Jumlah debitur pada tahun 2024 mencapai **1.792.579 orang** dari berbagai sektor pertanian yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (*Mixed Farming*) serta Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

Target jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program untuk tahun 2024 adalah sebanyak **700 pelaku usaha** dan terealisasi sebesar **700 pelaku usaha (100,00%)**. Capaian kinerja jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program (KUR) disebabkan adanya komitmen Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan dana KUR semaksimal mungkin untuk pembangunan sektor pertanian. Rekapitulasi jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program (KUR) sebagai berikut.

Realisasi Pelaku Usaha yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui KUR



Kinerja

Kredit Usaha Alsintan (KUA)

Progres Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP)



- Dari 16 Penyalur : 9 Penyalur sudah melaksanakan PKP yaitu (BPD Bali, BPD Jateng, BPD Yogyakarta, BPD Sumut, BPD Kalsel, Bank Nagari, Bank Sulselbar, Bank Sultra, dan Bank jatim); dan
- 7 Penyalur (BRI, BNI, Mandiri, BSI, BJB, Bank Kaltimara, dan BPR Agung Sejahtera) masih menunggu kesepakatan dengan Penjamin Kredit.

Realisasi Kredit Alsintan 2024 : Rp.7.380.000.000 (2,46%)



BPD Bali : Rp4.864.000.000; untuk 1 unit Combine Harvester, 1 unit Traktor L4018, dan 2 unit RMU (@ unit = 2 Milyar), : 3 debitur

Target Kinerja Kredit Alsintan



Rp 300 miliar Target Penyaluran Kredit Alsintan



12 debitur Target Debitur Kredit Alsintan



Rp 100 Juta Ketersediaan Subsidi Bunga

BANK BPD DIY



BPD DIY : Rp2.014.000.000; untuk 4 unit Combine Harvester (@ unit Rp.502,5 Juta) : 4 debitur

Bank Jateng



BPD Jateng : Rp502.500.000; untuk 1 unit Combine Harvester, : 1 debitur.

Kelengkapan Alsintan : berupa alat pemantau posisi (*global positioning system*) dan alat pemantau waktu penggunaan (*hour meter*)

Realisasi Pembayaran Subsidi Bunga : Rp 41.353.431 (41,35%)

No	Penyalur	Periode	Pengajuan Tagihan (Rp)	Pembayaran (SP2D) (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
					100.000.000
1	BPD Bali	Aug-24	3.264.000	3.264.000	96.736.000
2	BPD Bali	Sep-24	6.058.800	6.058.800	90.677.200
3	BPD DIY	Sep-24	1.423.750	1.423.750	89.253.450
4	BPD DIY	Oct-24	3.661.503	3.661.503	85.591.947
5	BPD Bali	Oct-24	26.945.378	26.945.378	58.646.569
6	BPD Bali	Nov-24	33.832.898		
7	BPD DIY	Nov-24	3.487.757		
Total			78.674.086	41.353.431	58.646.569

Sisa pengajuan Rp.37,32 Juta akan di proses pada tahun 2025



Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui Fasilitas Pembiayaan

Target jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan non program (fasilitasi pembiayaan) untuk tahun 2024 adalah sebanyak 250 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 250 pelaku usaha (100,00%), kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Kerja Fasilitas Pembiayaan. Capaian indikator jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui fasilitas pembiayaan salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pembiayaan sinergi sebagai berikut.

Program Lumbung Pangan bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

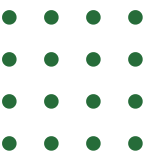
Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik pedesaan di bidang pertanian melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan. Program ini melahirkan pengelolaan pertanian dari hulu ke hilir dengan hadirnya 2 tempat penggilingan padi di Kabupaten Sukabumi dan Serang. Lumbung Pangan Sukabumi telah memperoleh sertifikat organik atas budidaya dan memperoleh sertifikat PSAT pada produk beras yang diproduksi. Selain itu, saat ini petani di Sukabumi telah memproduksi dan menjual beras organiknya dengan label Beras "Raos". Target Pengembangan Lumbung Pangan mengusung tema "TRADISIONAL - KONVENSIONAL - SEMI ORGANIK - ORGANIK".

Adapun rekapitulasi jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui fasilitas pembiayaan terdapat pada tabel berikut.

Realisasi Pelaku Usaha yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui Fasilitas Pembiayaan

No	Program	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Kredit (Rp)	Rerata Pinjaman per Pelaku Usaha (Rp/Orang)
1	Lumbung Pangan BAZNAS	Banten		55	Rp 596.074.708	Rp 10.837.722
			Kab. Tangerang	6	Rp 59.754.708	Rp 9.959.118
			Serang	49	Rp 536.320.000	Rp 10.945.306
2		Jawa Barat		80	Rp 1.618.168.500	Rp 20.227.106
			Bandung	20	Rp 535.820.000	Rp 26.791.000
			Garut	60	Rp 1.082.348.500	Rp 18.039.142
3		Jawa Tengah		68	Rp 954.583.000	Rp 14.037.985
			Sragen	68	Rp 954.583.000	Rp 14.037.985
4		D.I. Yogyakarta		47	Rp 589.850.000	Rp 12.550.000
			Sleman	47	Rp 589.850.000	Rp 12.550.000
TOTAL				250	Rp 3.758.676.208	Rp 15.034.705

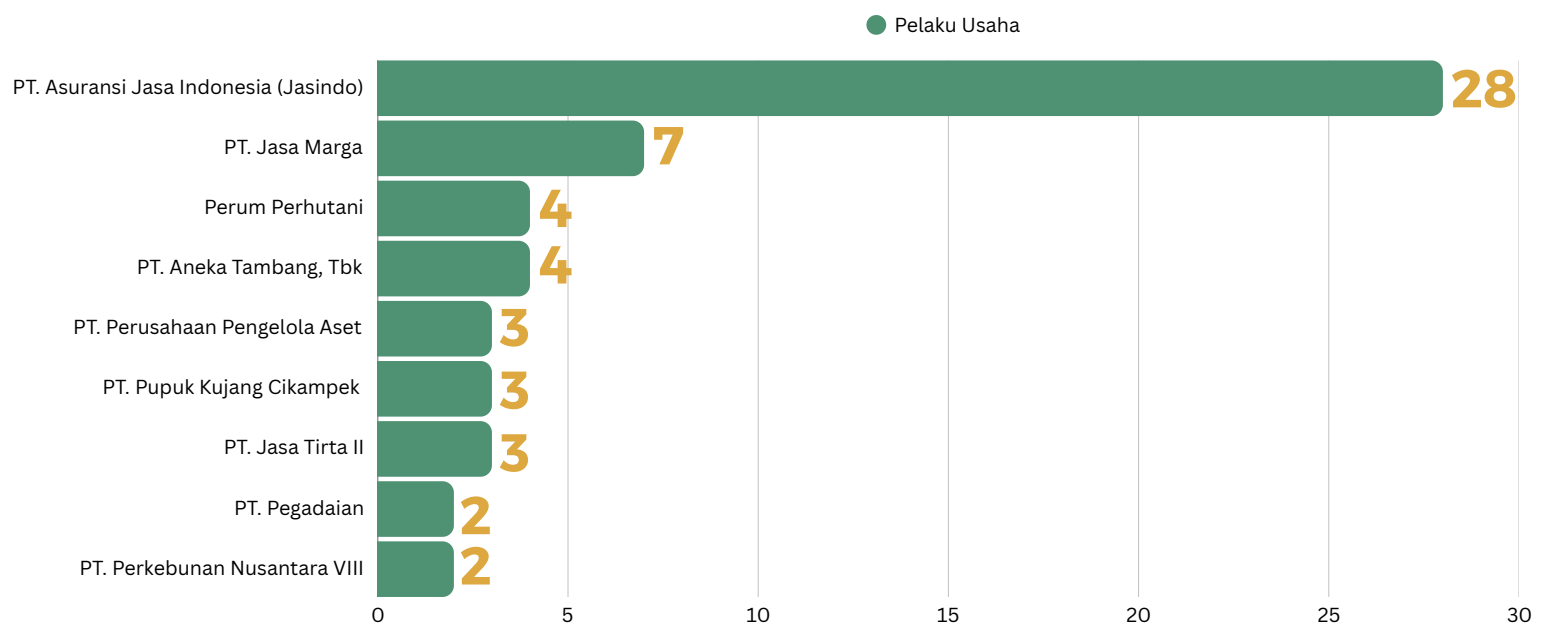




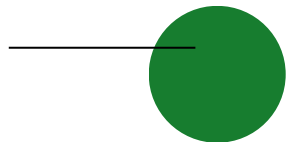
Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Permodalan melalui *Private Sector*

Permodalan dari **Private Sector** merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memfasilitasi permodalan dan memberikan informasi bagi petani, peternak, kelompok tani/ternak, dan gabungan kelompok tani/ternak guna mempertemukan dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2024 target kinerja jumlah pelaku usaha pertanian yang mengajukan akses permodalan dari *private sector* adalah sebanyak **50 pelaku usaha** dan terealisasi sebanyak **65 pelaku usaha (130,00%)**. Hal ini menunjukkan upaya Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam menjembatani pelaku usaha sektor pertanian kepada sumber pembiayaan alternatif sudah berhasil. Pada tahun 2024 terdapat **17 BUMN** yang menjadi sumber permodalan bagi 65 pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang pertanian yaitu. Adapun rincian capaian dari pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari *private sector* dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Permodalan dari *Private Sector*



dan perusahaan lainnya masing-masing sebanyak 1 Pelaku Usaha

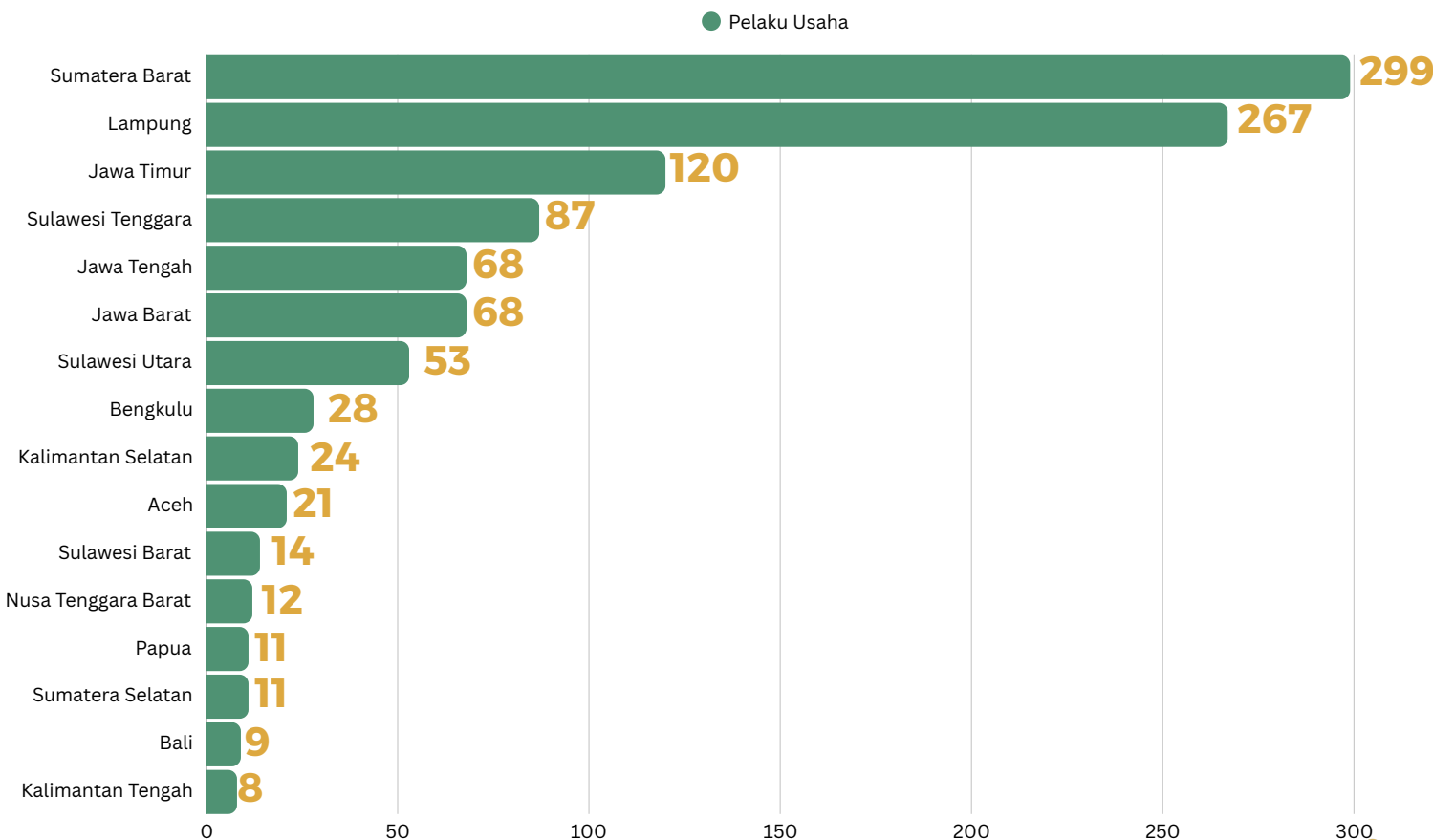


Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui Kelembagaan Pembiayaan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat tani yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional. LKM-A yang sudah berbadan hukum disebut juga Koperasi Pertanian. Inisiatif pembentukan LKM sektor pertanian atau yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) mampu untuk memberikan fasilitasi pembiayaan bagi anggota-anggotanya.

Target pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan melalui Kelembagaan Pembiayaan yaitu LKM-A dan Koperasi Pertanian di Tahun 2024 ini adalah 1.000 pelaku usaha, dimana tahun ini dapat terealisasi **1.100** pelaku usaha atau **110,00%**. Adapun sebaran pelaku usaha tahun ini terdiri dari 53 LKM-A dan Koptan 16 Provinsi di Indonesia, yang diejawantahkan dalam grafik berikut:

Rekap Pelaku Usaha yang mendapat Akses Pembiayaan melalui Kelembagaan Pembiayaan TA. 2024



Kendala dan Tindak Lanjut Peningkatan Akses Pelaku Usaha



Kendala

- 1.9 penyalur yang telah melakukan PKP dengan KPA, hanya 3 penyalur yang telah merealisasikan kredit usaha alsintan, karena belum ada kesepakatan PKS dengan Penjamin serta kesiapan penyalur untuk konektivitas sistem dengan SIKP serta identifikasi calon debitur yang memenuhi syarat
2. Masih terdapat 7 penyalur yang belum melakukan PKP Kredit Usaha Alsintan Tahun 2024
3. Belum adanya pendampingan/inkubasi kegiatan untuk keberhasilan program
4. LKM-A yang sudah berjalan (eksisting) belum melakukan update data baik aset maupun kepengurusan sehingga belum menggambarkan tingkat keaktifan LKM-A dengan sempurna di database karena masih manua
5. Aplikasi Sistem Informasi Database LKM-A dan Koptan (SIDAK) yang baru masih terdapat bug dan perlu dicek dan dikembangkan kembali terutama pengisian data LKM-A *eksisting*
6. Publikasi terkait TJSL ditingkat petani, kelompok tani, dan gapoktan masih belum optimal. Sehingga informasi dan pemahaman terkait TJSL masih kurang
7. Adanya perubahan sistem penyaluran dana TJSL dari BUMN yaitu sistem penyalurannya dialihkan ke Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022, pendanaan UMK (PUMK) mulai tahun 2023 mekanismenya disalurkan melalui BRI



Tindaklanjut

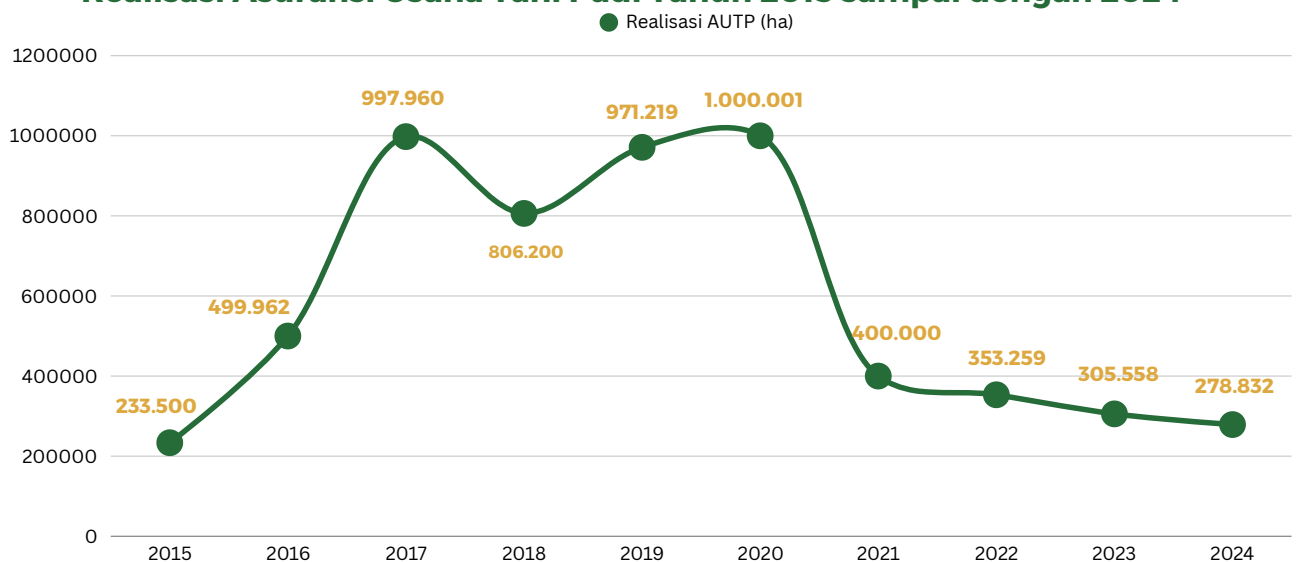
1. Menyiapkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) dengan penyalur, dimana masih ada 7 penyalur Kredit Alsintan yang belum melakukan PKP
2. Rekomendasi Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM tanggal 24 Desember 2024 bahwasanya untuk optimalisasi Optimalisasi Pelaksanaan Kredit Usaha Alsintan tahun 2025, Penyalur KUA dapat dilakukan tanpa penjaminan oleh Perusahaan Penjamin dengan syarat CKPN terkait transaksi mencapai 100%
3. Menyiapkan dukungan anggaran untuk kegiatan diseminasi program;
4. Melaksanakan forum nasional kembali untuk LKM-A dan Koperasi pertanian sehingga dapat bertukar pikiran dan pandangan terkait program-program kreatif antar LKM-A
5. Membuat penyempurnaan sistem informasi database LKM-A dan koperasi pertanian berbasis aplikasi yaitu SIDAK
6. Melakukan sosialisasi terkait program TJSL terhadap pelaku usaha yang jenis usahanya dibidang pertanian dengan melibatkan peran Dinas Pertanian tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun secara langsung atau melalui perrrtemuan apresiasi Pemberdayaan Permodalan.
7. Berkoordinasi dengan Bank Penyalur (BRI) selaku penyalur dana dan perusahaan BUMN sebagai penyedia dana TJSL (PUMK).



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi usaha tani padi (AUTP) merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tanaman padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen. Kegiatan AUTP pada TA. 2024 memiliki target mitigasi seluas **278.806 Ha**. Secara umum, aktivitas AUTP berkontribusi dalam mendukung program swasembada pangan dengan melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi yang terealisasi seluas **278.832,47 Ha (100,01%)**. Untuk menunjukkan pencapaian kinerja perlindungan usaha pertanian maka dapat dilihat realisasi AUTP (ha) yaitu sebagai berikut.

Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2015 sampai dengan 2024



Realisasi Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) TA 2024 (Ha)



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Kendala dan Tindak Lanjut Perlindungan Usaha Tani



Kendala

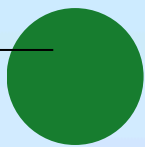
1. Kesadaran berasuransi petani rendah. Literasi, sosialisasi dan pelayanan prima perusahaan asuransi menjadi kunci meningkatkan kesadaran petani.
2. Proses klaim masih membutuhkan waktu. Adapun penyebabnya adalah karena Keterbatasan SDM perusahaan asuransi, berkas klaim tidak sesuai/tidak lengkap, dan pengembalian discharge form lama



Tindaklanjuti

1. Meningkatkan literasi, sosialisasi dan peningkatan pelayanan dari mitra pelaksana asuransi melalui aplikasi SIAP, kerjasama dengan perusahaan jasa layanan pemerintah dalam pendistribusian polis dan pembayaran klaim.
2. Akselerasi kegiatan AUTP baik offline dengan percepatan langsung ke daerah-daerah maupun online via zoom meeting untuk percepatan pendaftaran dan serapan realisasi
3. Berkoordinasi dengan Dinas dan PT. Jasindo terkait sosialisasi, koordinasi dan realisasi AUTP
4. Berkoordinasi dengan Dinas dan PT. Jasindo terkait sosialisasi, koordinasi dan realisasi pembayaran klaim AUTP;
5. Melakukan rekonsiliasi klaim Asuransi Pertanian baik antara Kementan dan Perusahaan Asuransi Pelaksana;
6. Melakukan pengembangan teknologi inovasi khusus untuk penilaian kerugian melalui teknologi satelit dengan mitra pelaksana asuransi untuk mempercepat proses penilaian klaim;
7. Melakukan sinergi kegiatan Asuransi Pertanian dengan program bantuan pemerintah lingkup Kementan (APBN dan APBD I/II) dan lainnya; dan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Asuransi Pertanian TA. 2024





Dokumentasi Kegiatan

Fasilitasi Pembiayaan melalui Program Lumbung Pangan BAZNAS



Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK)



Koordinasi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian



Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) Kredit Usaha Alsintan (KUA)

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)



Bab 08

Lampiran



Lampiran 1. Realisasi kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa TA 2024

NO.	PROVINSI	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
		(Rp.)	(ha)	(Rp.)	(%)	(ha)	(%)
1	Aceh	2.889.325.000	11.557	2.889.312.500	100%	11.557,25	100%
2	Sumatera Utara	7.610.500.000	30.442	5.731.397.563	75%	30.442,00	100%
3	Riau	834.000.000	3.336	509.000.000	61%	2.690,00	81%
4	Jambi	2.752.750.000	11.011	2.687.147.500	72%	11.011,00	100%
5	Sumatera Selatan	17.753.750.000	71.015	17.753.750.000	100%	71.015,00	100%
6	Lampung	7.050.500.000	28.202	6.433.541.560	91%	28.202,00	100%
7	Kepulauan Bangka Belitung	2.677.750.000	10.711	2.677.000.000	100%	10.711,00	100%
8	Kalimantan Barat	9.788.250.000	39.153	9.788.250.000	100%	39.153,00	100%
9	Kalimantan Tengah	13.343.285.000	53.377	13.343.284.500	100%	51.059,23	95,6%
10	Kalimantan Selatan	10.380.750.000	41.523	10.380.750.000	100%	41.523,00	100%
11	Sulawesi Selatan	3.412.000.000	13.648	3.412.000.000	100%	13.648,00	100%
12	Papua Selatan	10.000.000.000	40.000	10.000.000.000	100%	40.000,00	100%
Total		87.885.035.000	353.971	85.670.833.623	97%	351.011,11	99,2%

Lampiran 2. Realisasi kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2024

No	Provinsi	Target		Realisasi			
		Rp	Ha	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	Ha	%
1	Aceh	53.163.350.000	11.557	53.163.350.000	100%	11.557	100,00
2	Sumatera Utara	140.033.200.000	30.442	140.008.758.000	99,98%	30.442	100,00
3	Riau	15.345.600.000	3.336	15.345.600.000	100%	3.336	100,00
4	Jambi	63.820.400.000	13.874	58.057.494.739	91%	13.874	100,00
5	Sumatera Selatan	311.387.800.000	67.693	311.387.800.000	100%	67.693	100,00
6	Lampung	129.729.200.000	28.202	129.729.200.000	100%	28.202	100,00
7	Kepulauan Bangka Belitung	46.594.347.000	10.205	46.571.322.193	100%	10.205	100,00
8	Kalimantan Barat	180.103.800.000	39.153	180.103.800.000	100%	39.153	100,00
9	Kalimantan Tengah	234.958.800.000	51.078	233.428.958.506	99%	51.060	99,96
10	Kalimantan Selatan	192.413.400.000	41.829	166.518.576.948	87%	39.589	94,65
11	Sulawesi Selatan	62.780.800.000	13.648	62.780.800.000	100%	13.648	100,00
12	Papua Selatan	184.000.000.000	40.000	184.000.000.000	100%	40.000	100,00
Total		1.614.330.697.000	351.017	1.581.095.660.386	98%	348.758,71	99,36



Lampiran 3. Realisasi kegiatan Pengolahan Lahan Optimasi Lahan Rawa TA 2024

No	Kabupaten	Target		Realisasi			
		Rp	Ha	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	Ha	%
1	Aceh	10.401.525.000	11.557,25	10.365.885.000	100%	11.425	98,86
2	Sumatera Utara	27.397.800.000	30.442,00	13.685.400.000	50%	15.206	49,95
3	Riau	3.002.400.000	3.336,00	3.002.400.000	100%	3.336	100,00
4	Jambi	11.236.500.000	12.485,00	9.243.960.402	82%	5.053	40,47
5	Sumatera Selatan	60.923.700.000	67.693,00	46.625.850.000	77%	54.773	80,91
6	Lampung	25.381.800.000	28.202,00	25.332.390.000	100%	28.063	99,51
7	Kepulauan Bangka Belitung	9.184.500.000	10.205,00	7.992.720.000	87%	7.174	70,30
8	Kalimantan Barat	35.237.700.000	39.153,00	29.857.860.000	85%	34.493	88,10
9	Kalimantan Tengah	45.970.200.000	51.078,00	25.751.162.831	56%	29.110	56,99
10	Kalimantan Selatan	34.631.100.000	38.479,00	33.557.310.000	97%	36.231	94,16
11	Sulawesi Selatan	12.283.200.000	13.648,00	8.954.700.000	73%	13.648	100,00
12	Papua Selatan	36.000.000.000	40.000,00	30.797.154.000	86%	28.494	71,24
TOTAL		311.650.425.000	346.278,25	245.166.792.233	79%	267.005	77,11

Lampiran 4. Realisasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa dalam rangka penanganan Bencana Sumatera Barat

No	Kabupaten	Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Ha	Rp	Ha	%	Rp	%
1	Agam	104	863.200.000	104	100	863.200.000	100
2	Pasaman	50	415.000.000	0	-	0	-
3	Pesisir Selatan	118	979.400.000	118	100	979.400.000	100
4	Tanah Datar	335	2.780.500.000	335	100	2.780.500.000	100
5	Padang Panjang	16	132.800.000	0	-	0	-
6	Solok Selatan	67	556.100.000	0	-	0	-
TOTAL		690	5.727.000.000	557	81	4.623.100.000	81



Lampiran 5. Realisasi Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian TA 2024

No	Provinsi	Hand Sprayer	Pompa Air	Rice Transplanter	Traktor Roda 2	Traktor Roda 4	Traktor Roda Crawler
1	Aceh	740	2.353	3	456	89	
2	Bali	405	71		121		
3	Banten	204	2.647		263	48	
4	Bengkulu	1.372	431		7		
5	D.I. Yogyakarta	119	160		27		
6	D.K. Jakarta	20	22			2	
7	Gorontalo	105	1.093		56	23	
8	Jambi	505	1.486	10	220	10	
9	Jawa Barat	2.073	9.443	14	654	23	
10	Jawa Tengah	1.376	5.407	1	718	75	
11	Jawa Timur	1.449	5.044		333	49	
12	Kalimantan Barat	3.809	2.199	4	68	10	
13	Kalimantan Selatan	205	1.129	4	137	40	
14	Kalimantan Tengah	50	462		272	80	
15	Kalimantan Timur	233	661		101	5	
16	Kalimantan Utara	55	633		44		
17	Kepulauan Bangka Belitung	14	164		68	19	6
18	Kepulauan Riau	5	4		1		
19	Lampung	942	3.362	24	220	47	6
20	Maluku	206	381		36	4	
21	Maluku Utara	221	247		65	2	
22	Nusa Tenggara Barat	1.083	4.296		168	26	
23	Nusa Tenggara Timur	794	2.944		464	69	
24	Papua		216			1	
25	Papua Barat		9		5	3	
26	Papua Barat Daya		38				
27	Papua Pegunungan		37		2		
28	Papua Selatan	90	735	76	65	113	
29	Papua Tengah		76		7	4	
30	Riau	796	1.016	9	26	6	
31	Sulawesi Barat	393	512		48	2	
32	Sulawesi Selatan	2.230	7.296	30	852	135	2
33	Sulawesi Tengah	38	758		11	1	
34	Sulawesi Tenggara	52	1.142		145	29	
35	Sulawesi Utara	30	412		99	44	
36	Sumatera Barat	221	1.092	2	30		
37	Sumatera Selatan	554	2.375	9	292	179	16
38	Sumatera Utara	311	2.035		482	103	
	Jumlah	20.700	62.388	186	6.563	1.241	30



Lampiran 6. Rekapitulasi Data Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Tahun 2024

No	Provinsi	Kelas UPJA			Jumlah Unit
		Pemula	Berkembang	Profesional	
1	Aceh	1	60	3	64
2	Sumatera Barat	128	5	1	134
3	Riau	159	16	0	175
4	Jambi	103	16	3	122
5	Sumatera Selatan	70	0	0	70
6	Bengkulu	9	0	0	9
7	Lampung	58	21	6	85
8	Kep. Bangka Belitung	62	37	1	100
9	Jawa Barat	12	9	0	21
10	Jawa Tengah	158	63	19	240
11	DI Yogyakarta	125	16	3	144
12	Jawa Timur	159	11	0	170
13	Banten	41	0	0	41
14	Bali	186	2	2	190
15	Nusa Tenggara Barat	8	0	0	8
16	Nusa Tenggara Timur	5	0	0	5
17	Kalimantan Barat	26	0	0	26
18	Kalimantan Tengah	128	13	0	141
19	Kalimantan Selatan	107	21	8	136
20	Kalimantan Timur	10	0	0	10
21	Kalimantan Utara	14	0	0	14
22	Sulawesi Utara	10	0	0	10
23	Sulawesi Tengah	103	19	1	123
24	Sulawesi Selatan	366	34	5	405
25	Sulawesi Tenggara	3	0	1	4
26	Gorontalo	88	0	0	88
27	Sulawesi Barat	45	2	0	47
28	Maluku	17	0	0	17
29	Maluku Utara	10	0	0	10
30	Papua Barat	12	16	0	28
31	Papua Selatan	9	0	0	9
Jumlah		2.232	361	53	2.646



